

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM
HUTAN KERAKYATAN (SHK) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**Muhamad Romadhon Fadhillah
NPM : 1441020141**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM
HUTAN KERAKYATAN (SHK) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Pembimbing I : Dr. M Saifuddin M.Pd.

Pembimbing II : Drs. Mansur Hidayat M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM
HUTAN KERAKYATAN (SHK) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh :
Muhamad Romadhon Fadhillah

Sistem Hutan Kerakyatan sebagai salah satu konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan konsep pengelolaan hutan yang didirikan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran dan tekad untuk menjaga kelestarian hutan. Sistem Hutan Kerakyatan dapat menjadi model pemberdayaan yang tepat untuk kondisi masyarakat yang berpendudukan di kawasan hutan. Maka permasalahan seperti kerusakan hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat di atasi.

Fokus penelitian “Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) serta bagaimana SHK Lestari dalam mengelolah hasil hutan menjadi suatu produk kemasan yang bernilai jual”, adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan SHK Lestari, serta bagaimana pengelolaan hasil hutan yang SHK Lestari lakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), dimana dalam proses pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara sebagai metode pokok yang dilengkapi dengan metode observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa menggunakan analisa *kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini adalah: Kelompok SHK Lestari melakukan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahap yaitu, *Pertama*, tahap penyadaran dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang Sistem Hutan Kerakyatan. *Kedua*, tahap perencanaan yaitu dengan di ikut sertakan masyarakat dalam menyusun program kegiatan SHK Lestari, keikut sertaan masyarakat tersebut menjadi media pembelajaran masyarakat dalam menyusun suatu program kegiatan. *Ketiga*, Tahap Pengkapisitan, dalam mentranformasikan kapasitas masyarakat, upaya yang SHK Lestari lakukan yaitu melalui Pendidikan KeSHK dan Pengetahuan Organisasi, Pemetaan partisipatif, Training Resolusi Konflik dan Pembentukan Radio Komunitas. *Keempat*, Tahap Pendayaan, penguatan yang dilakukan yaitu dengan membentuk wadah atau terminal pengumpul hasil panen dan mendirikan kelompok usaha bersama.

SHK Lestari dalam mengelola hasil hutan/panen dengan dibentuknya kelompok usaha bersama. Kegiatan usahanya yaitu memproduksi hasil panen anggota SHK Lestari seperti coklat, cabai, melinjo, kemiri, kopi dan lain-lain menjadi suatu produk kemasan yang bertambah nilai jual. Produk kemasan tersebut antara lain ialah bubuk coklat, bubuk cabai, emping melinjo, kopi bubuk, dan kelanting.

Kata kunci : Pengelolaan Hutan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131 Telp (0721078088)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN (SHK) DI
DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama : **Muhamad Romadhon Fadhillah**
NPM : **1441020141**
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd
NIP. 196202251990011002


Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I
NIP. 197306012003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp (0721078088)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SISTEM HUTAN KERAKYATAN (SHK) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN** Disusun oleh; Muhamad Romadhon Fadhillah,

NPM : 1441020141, Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam, telah diajukan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada hari/tanggal : Selasa, 14 Agustus

2018

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T.I

Penguji I : Faizal, S.Ag. M.Ag

Penguji II : Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP.196104091990031002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ يَدِي النَّاسِ يُذِيقُهُمْ عَذَابَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”
“Katakanlah (Muhammad), ‘Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).’”

(QS. Ar-Rum (30) : 41-42)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur, Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dan ketulusan hati yang paling dalam kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibunda tercinta Surismi dan Ayahda Ahmad Dahlan Tantowi yang telah berusaha memberikan pengorbanan serta bimbingan yang tidak terhingga nilainya, baik moril maupun spiritual sehingga penulis bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi.
2. Keluarga Besarku, Nenek Masnah Siregar yang selalu mendo'akan, (Alm) Mak cik Halimah Tusa'diyah yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan sekolah. Beserta Mak cik dan Pak cik ku yang lain nya yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Adik ku tersayang Salsabilla Adelia yang senantiasa memberikan do'a dan dorongan untuk keberhasilan dan tercapainya cita-cita.
4. Sahabat - sahabatku yang sudah seperti keluarga bagiku; Uswatun Hasanah, Novita Sari, Krisma Maharanti, Renggom Puspita, Khoirul Imrah, Febriyansah, Rahmad Reno, Aci Harningsih, Tri Lestari.
5. Almamaterku Tercinta Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi (FDIK), UIN Raden Intan Lampung Yang Telah Menjadi Sarana Menimba Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Muhamad Romadhon Fadhillah adalah anak pertama dari dua bersaudara, putera dari pasangan Bapak Ahmad Dahlan Tantowi dan Ibu Surismi, dilahirkan di Bekasi Jawa Barat Pada tanggal 14 Ferbuari 1996..

Riwayat Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh:

1. SD Negeri 3 Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 16 Bandar Lampung Kecamatan Kupang Teba Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tamat Tahun 2011
3. SMA Swasta ADIGUNA Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tamat Tahun 2014
4. Pada Tahun 2014 Penulis Diterima Sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam)

Bandar Lampung, Agustus 2018

Hormat Saya

M. Romadhon Fadhillah

Npm. 1441020141

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang mana telah memberikan kenikmatan begitu besar kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-Nya, karena Dia-lah sang pengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah bentuk dari Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dan Allhamdulillah penulis telah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak H. Zamhariri S.Ag. M,Sos.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak Dr. M. Mawardi J, M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan
3. Bapak Dr. M. Saifuddin M,Pd. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Drs Mansur Hidayat M.Sos.I selaku pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik dari semester 1-8 yang telah mengarahkan selama perjalanan kuliah
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan yang telah membantu dan membina penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
6. Bapak Agus Guntoro selaku Ketua Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Hutan Raya Wan Abdul Rahman berserta Anggota dan Masyarakat sekitar atas izin dan kerjasama yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian
7. Teman-teman seperjuangan PMI Angkatan 2014, Uswatun Hasanah, Renggom Puspita, Krisma Maharanti, Novita Sari, Khoirul Imrah, Febriyansyah, Rahmad Reno

Bandar Lampung, Agustus 2018

M. Romadhon Fadhillah
NPM. 1441020141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
G. Penelitian Terdahulu	23
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM HUTANKERAKYATAN	
A. Pemberdayaan Masyarakat	27
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	27
2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan	29
3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan	30
4. Prinsip-prinsip Pemberdayaan	34
5. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pemberdayaan	36
6. Proses Pemberdayaan	39

B. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan	40
1. Pengertian Sistem Hutan Kerakyatan	40
2. Prinsip-prinsip Sistem Hutan Kerakyatan	42
3. Areal Kerja Sistem Hutan Kerakyatan	44
4. Pola Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan	44
5. Strategi Pengembangan Hutan Kerakyatan	46
6. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan	47
C. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat	51
BAB III SISTEM HUTAN KERAKYATAN (SHK) LESTARI DESA HANURA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT	
A. Gambaran Umum Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran	55
1. Sejarah Kelompok SHK Lestari	55
2. Kelembagaan SHK Lestari	58
3. Struktur Pengurus SHK Lestari	59
4. Keadaan SHK Lestari dan Sarana Prasana	60
B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari di Desa Hanura	68
1. Tahap Penyadaran	68
2. Tahap Perencanaan	77
3. Tahap Pengkapasitasan Masyarakat	82
4. Tahap Pendayaan	93
5. Hasil dan Pendapatan Petani	96
C. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Dalam Mengolah Hasil Hutan Menjadi Produk Usaha	98
BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN DI HUTAN RAYA WAN ABDURAHMAN DESA HANURA KEC. TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN	
A. Upayah Sistem Hutan Kerakyatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Raya Wan Abdurahman Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran	104

B. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Dalam Mengolah Hasil Hutan Menjadi Produk Usaha.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Luas Wilayah Kelola SHK Lestari	61
2. Jumlah Anggota SHK Lestari	62
3. Mata Pencarian Anggota SHK Lestari	64
4. Tahap Dan Langkah Kegiatan Sosialisasi Sistem Hutan Kerakyatan	69
5. Perencanaan Program SHK Lestari	77
6. Materi Pendidikan KeSHK-an	82
7. Rincian Komoditas Produksi Tahunan SHK Lestari (Harga Pasaran Tahun 2018)	
8. Daftar Produk Usaha Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari	96
9. Kegiatan Pengembangan Kapasitas SHK Lestari	111

PBAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan pengertian pembaca serta untuk memudahkan pemahaman maksud judul *“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”*, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut:

Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹

Alfitri di dalam bukunya menjelaskan, menurut Robert Chambers Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Pembangunan bersifat people centered (berpusat pada masyarakat), participator (partisipasi), empowering (pemberdayaan), dan sustainable (keberlanjutan).²

Menurut Peneliti dapat disimpulkan, Pemberdayaan masyarakat adalah Upaya masyarakat dalam menolong dirinya sendiri dengan cara membangkitkan

¹Syahrin Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999), hal 110

² Alfitri, *Community Devwlopment, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal 22

dan merubah pola pikir kesadaran mereka terhadap pentingnya membangun potensi yang dimiliki masyarakat dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mereka miliki dan di implementasikan secara tindakan nyata dan berkelanjutan. Agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan peka terhadap lingkungan disekitarnya. begitu pula yang dimaksud dalam Pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di kawasan hutan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan mempunyai arti proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain.³

Pengelolaan jika dilihat dari sisi ilmu manajemen, sebenarnya tidak akan jauh berbeda definisinya, karena kata pengelolaan sering disebut juga dengan istilah manajemen. Mengenai hal ini menurut Abd. Rasyad Shaleh, manajemen merupakan proses perencanaan tugas, mengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dalam kelompok tugas itu dan kemudian mengerakkannya ke arah pencapaian tujuan.⁴

Menurut Bambang Budiwiranto menjelaskan pengelolaan proyek pembangunan dipengaruhi oleh berbagai pihak terkait (*stakeholder*), yaitu orang yang terpengaruh oleh dampak suatu kegiatan dan orang yang dapat

³ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Cetak hal 300

⁴ Abd. Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*. (Jakarta ; Bulan Bintang. 1993) Hal 42

mempengaruhi dampak dari suatu kegiatan. Pihak terkait ini berupa individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga.⁵

Begitupula dengan pengelolaan projek pemberdayaan masyarakat kawasan hutan yang sangat berkaitan dengan masyarakat setempat, dikarenakan masyarakat sepenuhnya bergantung pada sumberdaya hutan demi kelangsungan hidupnya.

Dapat ditarik kesimpulan, Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengelolaan hutan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat setempat, baik berupa pengawasan hutan, rehabilitas hutan, pengorganisasian Petani hutan, serta mengolah hasil hutan menjadi produksi hasil hutan.

Sistem Hutan Kerakyatan merupakan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat yang digagas oleh sekelompok organisasi non pemerintah yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk Kelompok Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK).⁶

Menurut peneliti Pengelolaan Sistem Hutan Keraykatan adalah salah satu dari upaya pengorganisasian pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat di Indonesia, yang digagas oleh sekelompok masyarakat untuk mengelolaa dan menjaga kelestariaan dengan cara pengawasan dan merehabilitas habitat flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut, selain itu masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari hutan untuk dijadikan kegiatan Ekonomi Kreatif berupa

⁵ Bambang Budiwiranto, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, (Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2014) hal 28

⁶ Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, (Jakarta: Forclime, 2012) hal. 20

produk unggulan olahan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini Fokus Penelitian yaitu Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari yang Berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari merupakan sebuah kelompok Swadaya Masyarakat yang mana kelompok tersebut memiliki kesadaran sebagai masyarakat dan bertekad untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui pemberdayaan dan mengembalikan fungsi konservasi dan melestarikan alam yang sampai saat ini masih terjaga kelestarian Alam terutama di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud dengan judul **"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran"** merupakan penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestrai dalam usaha menjaga kelestarian alam serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat di Kawasan Hutan Wan Abdurahmana, melalui pelatihan-pelatihan pada masyarakat, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan penghasilan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta peduli terhadap alam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Pemberdayaan masyarakat melalui Sistem Hutan Kerakyatan merupakan sebuah model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam memberdayakan masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kawasan hutan, masyarakat tidak hanya menjaga dan melindungi kelestarian hutan, tetapi masyarakat juga dapat mengelola hasil hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
2. Terkait dengan kegiatan pengumpulan data, maka tidak ada kesulitan bagi peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan karena jarak lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. Selain itu sumber data yang sangat mudah di dapatkan.

C. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat, itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia bertambah besar. Baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, kebutuhan primer berupa sandang, pangan, perumahan dan kendaraan. Di era Globalisasi ini banyak sekali Masyarakat dan Pelaku Usaha yang melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut tanpa memandang akan berdampak negative pada sumber daya alam. Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, biotis, udara dan ruang, mineral, tentang alam (*landscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang

surut/arus laut.⁷ Adapun Kegiatan-kegiatan yang berpengaruh negative pada sumber daya alam yaitu penebangan liar, pembukaan hutan, perusakan hutan, industrilisasi dan Eksploitasi alam.

Dengan kegiatan tersebut lingkungan alam saat ini dalam keadaan yang memperhatikan banyak hutan yang rusak karena ulah manusia itu sendiri. Di Indonesia setiap tahunnya kerusakan hutan selalu bertambah karena ulah manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga ekonominya. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Akibat rusaknya hutan itu sendiri dapat menimbulkan masalah bagi semua makhluk hidup seperti bencana banjir tidak ada tumbuhan yang dapat menyerap air hujan untuk masuk kedalam tanah, tergangunya iklim di karenakan Indonesia memegang peran penting dalam kestabilan iklim dunia, hilangnya tempat tinggal bagi satwa dan juga bencana kekeringan saat musim kemarau.⁸

Islam mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam, Allah SWT menjelaskan di dalam Al-quran ialah:

Telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41-42 :⁹

⁷ Moh.Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir, *Lingkungan:Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987) hal 18

⁸ <https://www.wwf.or.id/2018/02/05/Kehutanan>

⁹ Al-quran dan terjemahannya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ يَدِي النَّاسِ يُذِيقُهُمْ عَذَابَ
 الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجُوعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya; Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41) Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (42)

Isi kandungan tersebut ialah menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, (yang berlebihan) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri.

Dalam Upaya menjaga kelestarian hutan dari kerusakan hutan tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan hutan dari beberapa pihak baik dari pemerintah maupun yang digagas oleh swadaya masyarakat . Adapun tujuan

pengelolaan hutan ialah karena hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.¹⁰ Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan maka pengelolaan hutan yang di gunakan adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka.

Banyak sekali konsep-konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang di terapkan oleh pemerintahan Indonesia antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan Hutan Adat. Namun konsep tersebut belum mengedepankan rakyat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. Rakyat hanya diajak, dan bukan rakyat yang menentukan sistem pengelolaan hutan, masyarakat hanya ikut menumpang di lahan tersebut.

Walhi Lampung (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengagas sebuah konsep pengelolaan yang disebut Sistem Hutan Kerakyatan yaitu sistem hutan dan kerakyatan. Sistem hutan untuk menggambarkan bahwa hutan bukan

¹⁰ Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Hutan Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hal 113

sekedar tegakan kayu, melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan yang terdiri dari berbagai elemen, diantaranya hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, kebun, ladang, permukiman, hutan keramat, dan banyak lagi yang tergantung komunitas dan sistem ekologi. Kerakyatan menegaskan bahwa aktor utama dalam pengelolaan hutan adalah komunitas lokal.

Dalam memadukan Aspek Ekonomi dan Aspek Kelestarian hutan di suatu program pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan berdekatan dengan hutan, maka pemberdayaan menggunakan Pendekatan Pembangunan Berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan masyarakat yang memperhitungkan aspek lingkungan. Unsur-unsur pelestarian lingkungan telah dimasukkan di dalam suatu program pembangunan. Terutama yang menyangkut mobilisasi sumber daya alam dan aspek konservasi, agar penggunaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana.¹¹ Pengembangan usaha memanfaatkan sumber daya alam, social, dan budaya yang dimiliki menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Menggali potensi tersebut pada tahap ini perlu mempertimbangkan budaya dan kearifan loka yang dimilikii oleh masyarakat setempat. Dengan cara

¹¹Seotomo, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hal 191

ini pemberdayaan akan lebih mudah dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat. Disisi lain budaya dan kearifan local akan tetap lestari.¹²

Dalam pemanfaatannya perlu di ingat bahwa tidak semua sumberdaya alam dapat diperbarui, maka dari itu dalam kegiatan pemberdayaan berbasis potensi alam juga harus mempertimbang-kan aspek kelestarian lingkungan, eksploitasi potensi alam secara besar-beasaran tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan bukan merupakan kegiatan pemberdayaan, di karenakan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial saja. Lingkungan harus menjadi prioritas untuk lestari, karena hakikat dari kegiatan pemberdayaan adalah menuju pada kemandirian masyarakat.

Kehadiran Sistem Hutan Kerakyatan Berperan penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Alam bagi masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan hutan, di karenakan memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat setempat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Telah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.88/menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan

¹² Dr. Oos M. Anwas , *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Cetakan ke 2 (Bandung ; Alfabeta 2014) hal 131

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Ayat 2)¹³

Begitupula peran dari Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yaitu Sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat yang mengelola dan menjaga Kawasan Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Desa Hanura, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Tidak hanya mengelola dan menjaga Kawasan Hutan SHK Lestari Juga mempunyai Program Pemberdayaan untuk masyarakat di berbagai aspek salah satunya pemberdayaan Ekonomi, Dahulu masyarakat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saja. Mereka menebang semua pohon dan menggantikan dengan tanaman kopi. Hutan yang kian kritis membuat masyarakat berpikir untuk mendirikan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari. Dengan di damping SHK Lestari perlahan-lahan warga mulai mengelola tanam tumbuh di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman dan membentuk skema pelestarian hutan.¹⁴

Meskipun anggota SHK Lestari bekerja mengelola tanam tumbuh di kawasan hutan, mereka memiliki peraturan kelompok. Peraturan ini wajib ditaati oleh semua anggota kelompok dan jika melanggar tentu ada sanksi yang sudah disepakati. Peraturan yang sudah digalakan sejak awal tahun 2000-an itu perlahan membuahkan hasil. Terbukti dengan masih adanya 266 vegetasi endemic tanaman hutan kemudian ditemukannya 82 populasi burung dan 26 satwa liar.

¹³ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.88/menhut-II/2014

¹⁴ Bapak Agus Guntoro, Ketua SHK Lestari , Wawancara 11 Januari 2018, Via Telephone

Dengan memiliki aturan yang tegas demi kelestarian hutan, masyarakat penerima manfaat bisa tetap survive dengan system tumpeng sari. Warga memiliki penghasilan dari hutan melalui tajuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti dari tanaman kopi, coklat, aren, cengkeh, pala, melinjo, durian, jengkol, dan lainnya. Kemapanan ekonomi masyarakat terbukti dari pundi-pundi rupiah yang mereka hasilkan. Dari tanaman coklat mampu panen sebanyak 100 ton per tahun atau setara dengan Rp 3 Miliar, sedangkan komoditas kopi mencapai 30 ton pertahun atau Rp. 1,2 miliar. Itu belum termasuk komoditas lainnya yang kerap diburu pasar internasional, nasional dan local. setiap kelompok boleh menambah jumlah keanggotaannya agar semakin banyak penerima manfaat hutan, namun areal garapan tidak boleh meluas apalagi sampai membabat hutan yang masih alami.

Tidak hanya mendapatkan penghasilan dari hasil hutan yang belum di olah. Warga desa Hanura juga mendapatkan penghasilan dari produksi rumah tangga atau kelompok usaha yang memproduksi hasil olahan hasil tani maupun hutan seperti kopi robusta, kripik tempe, kripik kentang, kelanting, sale belimbing wuluh, sirop belimbing wuluh, gula aren, dan kurma tomat. Produk-produk tersebut di *branding* menjadi produk unggulan desa dengan pengemasan yang baik.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat yang di lakukan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman terhadap para anggota khusus nya dan masyarakat pada umumnya, maka

sengaja penulis mengadakan penelitian ini dengan mengangkat judul
“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas, penulis mengambil masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari di kawasan hutan raya Wan Abdurahman Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran ?
2. Bagaimana Mengelolah Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari dalam mengolah hasil hutan menjadi produk usaha ?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari di kawasan hutan raya Wan Abdurahman Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran
- b. Mengetahui Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari dalam upaya mengolah hasil hutan menjadi produk usaha desa

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1) Bagi Pemerintah

Agar mendapat perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kawasan hutan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang maju dan mandiri

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menyadari model pemberdayaan melalui Sistem Hutan Kerakyatan adalah model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam memberdayakan masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek social maupun ekonomi.

F. Metode Penellitian

Untuk mengetahui suatu permasalahan agar hasil penelitian dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, tepatnya di Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman.

2. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya bahwa penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Artinya penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan Pengelolaan SHK Lestari Hutan Raya Wan Abdurahman dalam pemberdayaan masyarakat di desa Hanura kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Cet. VII, Manda Maju, Bandung, 1996, hal.32

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitiannya hanya semata-mata melukiskan objek tertentu. Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁶ Dalam kaitan dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan SHK Lestari Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Desa Hanura kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian,¹⁷ atau keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari 9 orang kelompok induknya, 22 orang sub kelompoknya dan ditambah dengan Anggota yang ada di SHK Lestari Desa Hanura yang berjumlah 672 orang, sehingga populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 703 orang.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metodelogi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 29

¹⁷ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), hal

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.¹⁸ Dapat di katakana juga bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.¹⁹ Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Snowball sampling* (*metode pengambilan seperti bola salju*). Dalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi criteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi criteria menjadi anggota sampel. Demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang inginkan terpenuhi.²⁰

Pengumpulan data dimulai dari 3 perwakilan pengurus SHK Lestari yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Dari dua perwakilan pengurus SHK Lestari tersebut sampel bertambah 14 Orang, yaitu dua orang perwakilan dari tujuh kelompok yang ada di SHK Lestari. Lalu bertambah lagi 2 orang

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-IX, hal. 104

¹⁹ Kountur Ronny, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Buana Printing, 2009, Cet ke II) hal. 174

²⁰ Irawan Soeharto., *Op.cit* hal 63

dari satu perwakilan dinas kehutanan provinsi lampung dan satu orang perwakilan dari LSM Wahana Lingkungan (Walhi). Maka sampel yang terdapat di penelitian ini berjumlah 19 Orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Interview

Interview yaitu bertukar informasi atau ide memulai tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Menurut pendapat Kartnini Kartono, Interview merupakan proses kegiatan tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan seacara fisik/langsung.²² Jawaban-jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam untuk mendapatkan data yang diperlukan (*tape recorder*).²³ Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar di mengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.

Jenis interview yang peneliti gunakan adalah *interview bebas terpimpin* yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan

²¹ Kuontoro Ronny, *Op.cit*, hal. 231

²² Kartini Kartono, *Ibid*. hal. 32

²³ Irwan Suhartono, *Op.cit*, hal. 67-68

pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.²⁴

Peneliti menggunakan interview ini karena peneliti mengharapkan data yang di butuhkan akan dapat di peroleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview ini ditunjukan kepada pengurus, anggota dan masyarakat yang menjadi sampel yang telah peneliti tunjukkan dalam penelitian ini.

Data yang digali oleh peneliti melalui metode interview ialah seperti informasi tentang latar belakang pendirian SHK Lestari, cara pengelolaan pelestarian hutan maupun pengelolaan hasil hutan, serta upaya-upaya SHK lestari dalam memaksimalkan potensi SDA maupun SDM di Desa hamura. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui respon yang diberikan oleh anggota maupun masyarakat terhadap program Sistem Hutan Kerakyatan.

b. Metode Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja

²⁴ Kartini Kartono, *Op.cit*, hal. 128

melainkan juga pencatatan guna memperoleh data-data yang lebih konkret dan jelas.²⁵

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang di observasi dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh keterangan yang objektif.

Metode non partisipan ini dilaksanakan dengan cara berada di lokasi penelitian, hanya pada saat melaksanakan penelitian dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu di SHK Lestari tersebut. Dalam hal ini peneliti hanya semata-mata pengamat dan mencatat terhadap semua gejala atau fenomena dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah "Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran".

Adapun data yang ingin didapatkan melalui metode observasi ialah melihat proses step by step kegiatan pengelolaan hutan maupun hasil hutan yang dilakukan oleh Anggota SHK Lestari, melihat tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan rutin yang mereka lakukan di SHK Lestari, dan melihat gejala-gejala perubahan yang dialami anggota SHK Lestari, seperti perubahan ekonomi dll.

²⁵ Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiata, 2004) hal 44

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen atau rapat, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.²⁶

Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis orang lain.²⁷ peneliti akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan atau menemukan data yang ingin diperoleh seperti dokumen tentang sejarah desa Hanura ataupun sejarah hutan Wan Abdurahman, dokumen sejarah pendirian SHK Lestari, struktur pengurus SHK Lestari, dan dokumen program kerja SHK Lestari serta photo-photo kegiatan SHK Lestari.

5. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka proses selanjutnya merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penelitian yaitu analisis data. Adapun jenis metode analisa data yang peneliti gunakan ialah analisis data kualitatif.

Di dalam kutipan buku Sugiyono (2010), Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

²⁶ Bimo Walgito, *Psikologis Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003) hal. 32

²⁷ Irwan Suhartono, *Op.cit*, hal. 70

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction, data display, dan data consulation drawing/verification*.²⁸

a. Reduksi

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, member kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.²⁹

Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian memilah-milahnya kedalam katagori tertentu.

b. Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarnya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.³⁰

Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2010) hal 246

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973),hal 75

³⁰ Sutrisno Hadi, *Ibid.*, hal.75

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan (verifikasi) data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan dengan cara deduktif.³¹

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³²

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian Is Eka Herawati (Jurnal Agribisnis Terpadu, Vol 10 No. 1 2017)

Mahasiswa Prodi Agribisnis, Universitas Terbuka Serang tentang “*Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Hurun Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*”, penelitian ini menjelaskan upaya menyusun rumusaan Strategi pemberdayaan yang tepat untuk dilakukan SHK Lestari demi keberlangsung kelompok tersebut, dengan berdasarkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang terdapat di kelompok SHK Lestari. Factor – factor tersebut lalu

³¹ Sutrisno Hadi, *Ibid.*, hal.75

³² Sutrisno Hadi, *Ibid.*, hal. 75

di Analisis menggunakan Evaluasi Analisis Internal (IFE), Evaluasi Analisis Eksternal (EFE) dan di tuangkan dalam Matriks Internal-Eksternal (IE) yang diolah secara kuantitatif serta Matriks SWOT yang diolah secara kualitatif. Maka ditemukan rumusan strategi pemberdayaan yang tepat untuk SHK Lestari yaitu; penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk.

2. Skripsi Kiki Ayudanti, *"Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam : Studi Pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat"*, hasil penelitian ini yaitu efektivitas hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif dengan adanya hutan kemasyarakatan ini sudah dapat mampu meningkatkan 100 % pendapatan masyarakat pengelola HKm. Tingkat konsumsi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan sudah dapat terpenuhi 61,04 %. Akan tetapi, belum bisa terpenuhi sepenuhnya karena 38,96 % masyarakat mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penggarapan lahan HKm tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari
3. Penelitian Mukhtar (WACANA Vol. 13 No. 1 Januari 2010 ISSN.141101-99) Mahasiswa Magister program PSLP PPSUB tentang *"Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat"*, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan program HKm berbasis kearifan lokal belum

dipahami dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat memandang HKm sebagai kesempatan untuk memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Penerapan program HKm oleh masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan masih sebatas pada pelestarian jangka pendek. Hal itu ditunjukkan dengan tidak dipatuhinya konsensus yang mereka sepakati terkait dengan komposisi tanam 75 % tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) dan 30 % tanaman pohon/kayu. Hal itu disebabkan karena masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meksipun terdapat kesamaan tempat di penelitian pertama yang ditulis oleh Eka Herawati, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam pemamparan permasalahannya. Jika penelitian pertama memfokuskan bagaimana penulis berupaya memberikan rumusan strategi alternative pemberdayaan yang efektif yang di terapkan oleh SHK Lestari dengan memperhatikan factor kekuatan, kelemahan, peluang, dan acaman yang ada di SHK Lestari. Sedangkan Penelitian ini lebih mengfokuskan bagaimana upaya SHK Lestari dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat dengan cara pelatihan-pelatihan.

Adapun persamaan dari penelitian kedua yang di tulis oleh Kiki Ayudanti ialah pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat baik itu HKm atau SHK mampu meningkatkan pendapatan anggotanya. Perbedaannya adalah penelitian kedua hanya memfokuskan persoalan efektivitas program HKm dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nya saja. Tidak membahas tentang efektivitas program HKm dalam mengembangkan kapasitas SDM masyarakat setempat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana SHK Lestari dapat berdampak efektif dalam mengembangkan kapasitas SDM masyarakatnya.

Perbedaan penelitian ke ketiga yaitu terletak di pemahaman masyarakat terhadap program pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu sendiri. Jika penelitian ketiga menunjukan bahwa pengelolaan program HKm berbasis kearifan lokal belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sehingga mengakibatkan masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Sedangkan di dalam penelitian ini, berawal dari kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mendukung pelestarian sumberdaya hutan, sehingga pemanfaatan lahan dan kelestarian hutan berjalan seimbang mencegah perilaku eksploitatif terhadap hutan.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM HUTAN KERAKYATAN

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang berarti kemampuan untuk melakukan kegiatan, Kekuatan, dan Upaya.¹ Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identic dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya.²

Istilah pemberdayaan, juga, dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dll.³ Bisa dikatakan juga pemberdayaan sebagai Upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi,

¹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa IndonesiaI*, (Surabaya ; Amanah,1997), hal 110

²Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat si Era Global*, (Bandung ; Alfabeta, 2013), hal

³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Seobiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Public*, (Bandung ; Alfabeta, 2015), hal 28

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁴

Secara lebih rinci menurut Slamet (dalam buku Oos M. Anwas), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasana, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, mengambil resiko. Menangkap informasi, dan bertindak inisiatif.⁵

Karena itu, World Bank (2011) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan *proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat*.

Menurut peneliti pemberdayaan merupakan Upaya masyarakat dalam menolong dirinya sendiri dengan cara membangkitkan dan merubah pola pikir kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun potensi yang dimiliki masyarakat dalam hal Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mereka miliki dan di implementasikan secara tindakan

⁴Syahrin Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999), hal 110

⁵Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 49

nyata. Agar terwujudnya masyarakatnya sejahtera, mandiri, dan peka terhadap lingkungan disekitarnya.

Kenapa masyarakat harus memiliki rasa kepekaan terhadap lingkungan. Karena di dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya-alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup.⁶

2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur social yang tidak adil).⁷ Maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Seobiato, *Op.Cit.* hal 34

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hal 60

pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Adapun pendapat lain dari Sulistiyanj menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengandalkan apa yang mereka lakukan.⁸

Jadi bisa dikatakan tujuan Pemberdayaan masyarakat ialah mengubah masyarakat yang tidakberdaya menjadi masyarakat yang berdaya atau mandiri. Dalam segala aspek baik aspek ekonomi, kualitas hidup maupun kesejahteraan social dan keadilan social. Selain itu masyarakat dapat mandiri dalam berfikir, bertindak, dan dapat menentukan keputusan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja

⁸ Hamdani Fauzi, *Pemberdayaan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hal 196

tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapinya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik.

Parson menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu anatar pekerja social dank lien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas.⁹

Dalam konteks pekerja social pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media

⁹ Edi Suharto, *Op.Cit*, hal 66

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Araz Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi system besar (*large-system-strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi system besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁰

Membicarakan strategi pemberdayaan pasti juga akan membicarakan pendekatan pemberdayaan. Karena tanpa melakukan pendekatan, strategi pemberdayaan itu tidak akan tepat sasaran. Dengan melakukan pendekatan, pemberdayaan akan mengetahui strategi apa yang akan digunakan, yang mana sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, kebutuhan masyarakat, dan potensi lingkungan yang mendukung.

Menurut Suharto (dalam buku Oos M. Anwas) dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P ialah:

¹⁰ Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 87

- a. Pemungkiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha¹¹.

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi diantara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain, masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.¹²

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk

¹¹ Oos M. Anwas, *Ibid.* hal 87

¹² Najiyati Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands Internasional-Indonesia Programe, 2005) hal 54

sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melihat pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkesnampuan, melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan di banding masyarakat sendiri, tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹³

¹³ Najiyati Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Ibid.* hal 58-60

5. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Bentuk bentuk kegiatan pemberdayaan sangat bermacam-macam sesuai dengan sector/aspek yang dibutuhkan dalam masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Di bawah ini ada beberapa bentuk bentuk pemberdayaan menurut Oos M. Anwas (2013):

a. Pemberdayaan Sektor Pendidikan

Pemberdayaan di sector pendidikan merupakan sector penting dalam mengubah perilaku kearah yang lebih baik. Pemberdayaan aspek pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan.

Di kutip Oos M. Anwas dalam bukunya menurut Benyamin Bloom, perilaku masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga aspek yaitu; pengetahuan, sikap, dan keterampilan.¹⁴

Karena pada hakikat nya pemberdayaan masyarakat adalah mengubah perilaku masyarakat. Mengubah perilaku ini dimulai dari mengubah cara berpikir (*mind set*) dari pengetahuan dan pemahamannya, selanjutnya diharapkan memiliki sikap yang positif untuk berubah, selanjutnya diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai bentuk usaha untuk mengubah kearah yang lebih nyata.

b. Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil/ Ekonomi

Dalam Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha.. pemberdayaan dalam aspek ini

¹⁴ Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 115

justro yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut Freire (1977) dengan teori penyadaran menjelaskan bahwa pada setiap individu sesungguhnya dalam setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut memiliki dan menerapkan kompetensi untuk analisis kebutuhan dan potensi sasaran. Selanjutnya agen pemberdayaan dituntut untuk menanamkan jiwa kewirausahaan.¹⁵

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari proses produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu didorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu juga perlu mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mereka bisa mengakses penambahan modal usaha. Untuk itu diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu.

c. Pemberdayaan Sektor Perkebunan

Pemberdayaan petani diarahkan dari mulai proses produksi, pemeliharaan, panen, pasca panen, serta pemasaran. Pemberdayaan petani

¹⁵ Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 125

ini diarahkan pada usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah suatu industry biologis yang memanfaatkan materi dan proses hayati untuk memperoleh laba yang layak bagi pelakunya yang dikemas dalam berbagai subsistem mulai dari subsistem pra produksi, produksi, panen dan pasca panen serta distrubusi dan pemasaran (Badan Litbang Pertanian,1999)¹⁶

Bentuk pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai metode, sesuai dengan permasalahan dan potensi, berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Metode pemberdayaan tersebut misalnya: kursus tani, pelatihan, demonstrasi hasil inovasi pertanian, atau kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

d. Pemberdayaan Berbasis Potensi Wilayah

Pemberdayaan berbasis Potensi wilayah ialah pemberdayaan yang didasarkan pada potensi wilayah (alam, social, budaya) sekitar masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam, sumberdaya alam, social atau budaya yang baik itu dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan mengacu pada potensi tersebut. Dengan cara ini pemberdayaan akan lebih mudah dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat. Disisi lain budaya dan kearifan local akan tetap lestari. Selain itu pemberdayaan berbasis potensi wilayah harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tidak

¹⁶ Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 127

hanya memetingkan finansial dengan cara mengeksploitasi potensi alam secara besar-besaran.¹⁷

6. Proses Pemberdayaan

Mengenai pemberdayaan masyarakat perlu adanya proses, melalui proses belajar masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Untuk mencapai itu perlu adanya tahapan-tahapan dalam memberdayakan suatu masyarakat yaitu¹⁸:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan (*takwin*) tahap ini merupakan tahap merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini fasilitator atau pemberdaya masyarakat mampu menciptakan kondisi yang baik dan memotivasi mereka untuk melakukan penyadaran dari kondisinya pada saat itu, dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat menghantakan masyarakat sampai pada kesadaran, sehingga masyarakat semakin terbuka dengan sekitarnya dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperbaiki kondisi yang ada.
- b. Tahap pembinaan atau penataan (*Tandzim*) pada tahap ini, adanya proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik. Dalam hal ini masyarakat akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang baru dimana nanti nya berkaitan dengan tuntutan

¹⁷ Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 131

¹⁸ Nani Machendarawaty & Agus Ahmad Syafe'i, *Pemberdayaan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai Tradisi*, (PT Remaja Rosdikarya, Bandung, 2001) Cet. Pertama hal. 42

kebutuhan yang ada, sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c. Tahap keterlepasan dan kemandirian (*taudi'*) dalam tahap ini adanya peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut ditandai dengan munculnya inisiatif, inovatif dan kreatif yang baru, namun masyarakat yang sudah melewati tahapan-tahapan pemberdayaan tidak di lepas begitu saja, melainkan adanya keberlanjutan pada tahap ini, seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan nyata dalam pembangunan.

B. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan

1. Pengertian Sistem Hutan Kerakyatan

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁹

Sistem Hutan Kerakyatan merupakan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat yang digagas oleh sekelompok organisasi non pemerintah yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk Kelompok Pendukung

¹⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan

Sistem Hukum Kerakyatan (KpSHK).²⁰ Sistem hutan untuk menggambarkan bahwa hutan bukan sekedar tegakan kayu, melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan yang terdiri dari berbagai elemen, diantaranya hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, kebun, ladang, permukiman, hutan keramat, dan banyak lagi yang tergantung komunitas dan sistem ekologi. Kerakyatan menegaskan bahwa aktor utama dalam pengelolaan hutan adalah komunitas lokal. Sistem Hutan Kerakayatan yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat atau yang bermukim di sekitar hutan tersebut. Dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sistem ini tidak menempatkan hutan ke dalam kawasan hutan maupun non hutan menurut Negara seperti yang tercantum dalam UU No 41 Tahun 1999, SHK memandang pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal, tempatan atau masyarakat adat dapat dilakukan di kawasan manapun berada dengan tujuan pemanfaatan, perlindungan dan konservasi dan dikembangkan melalui prinsip-prinsip seperti pelaku utamanya masyarakat, memiliki nilai sosial-budaya setempat (adat) termasuk nilai religi, pengelolaan bersifat kolektif,

²⁰ Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, (Jakarta: Forclime, 2012) hal. 20

berkelanjutan dan lestari secara ekologi, berkeadilan sosial dan mendukung ekonomi kerakyatan (kemandirian, kebersamaan, keberlanjutan dan kelestarian).

2. Prinsip – Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan

Sistem hutan kerakyatan memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan hutan berbasis masyarakat lain nya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (2004) sebagai berikut :

1. Aktor utama pengelola adalah masyarakat lokal;

Pelaku utama pengelola hutan adalah masyarakat setempat yang memiliki kesadaran untuk menjaga dan mengelola kelestarian hutan. Masyarakat mengelola secara bersama dengan membentuk suatu lembaga atau kelompok, kelompok tersebut dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat.

2. Memiliki wilayah yang jelas dan memiliki kepastian hukum yang mendukungnya.

Sistem hutan kerakyatan harus memiliki wilayah atau teritori garapan lahan yang jelas di dalam suatu kawasan hutan. Sehingga luas wilayah garapan tidak semakin bertambah dan hutan tetap terjaga. Dan memiliki sistem hukum yang diterima dan berlaku di wilayah kelola.

3. Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya bersifat langsung dan erat.

Dikarena masyarakat setempat berhadapan langsung dengan lingkungan hutan maka hubungan masyarakat dengan hutan bersifat erat dan saling

bergantung. Ekosistem menjadi bagian penting dari sistem kehidupan rakyat setempat, dan masyarakat dapat menambah pendapatan ekonomi dari mata pecaharian sebagai petani di kawasan hutan.

4. Pengetahuan local dan teknologi lokal menempati posisi penting dalam sistem pengelolaan hutan

Pengetahuan local atau budaya setempat di utamakan dalam mengelola hutan disamping pengetahuan modern untuk memperkaya. Teknologi yang dipergunakan yaitu teknologi lokal, merupakan teknologi yang telah melalui proses adaptasi dalam mengembangkan SHK setelah proses penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat.

5. Skala produksi sumber kekayaan hutan hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip kelestarian

Jumlah Produksi di batasi apabila sumber kekayaan hutan tersebut termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang langka. Jika tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, maka jumlah produksi tidak dibatasi.

6. Sistem ekonomi didasarkan atas kesejahteraan bersama.

Yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan ekonomi di kalangan masyarakat. Tidak untuk mensejahterakan perorangan atau individu saja tapi kegiatan ekonomi tersebut dapat mensejahterakan keseluruhan masyarakat setempatnya.²¹

²¹ Rahmawaty, *Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat*, (Univ. Sumatera Utara: e-USU Repository, 2014) Jurnal Bab II, hal 3

3. Areal Kerja Sistem Hutan Kerakyatan

Areal kerja Sistem hutan Kerakyatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Yang mana dapat dilakukan di kawasan manapun berada. Tetapi kebanyakan kelompok Sistem Hutan Kerakyatan yang di Indonesia menggunakan kawasan yang sama seperti hutan rakyat lain nya yaitu Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja di jelaskan dalam Pasal 92 PP Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat diberikan pada: (a) hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti tanaman nasional, (b) hutan lindung, dan (c) Hutan Industri.²²

Kawasan hutan lindung dan hutan industry sangat dianjurkan dikarenakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan: belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

4. Pola Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan

Dalam rangka pengembangan hutan rakyat, dikenal tiga pola hutan rakyat, yaitu :

1. Pola Swadaya; hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau pereorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau

²² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal 187

perorangan itu sendiri. Melalui pola ini masyarakat didorong agar mau dan mampu untuk melaksanakan pembuatan hutan rakyat secara swadaya dengan bimbingan teknis kehutanan.

2. Pola subsidi; (model hutan rakyat); hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya. Subsidi atau bantuan diberikan oleh pemerintah (melalui Inpres Penghijauan, Padat Karya dan dana bantuan lainnya) atau dari pihak lain yang peduli terhadap pembangunan hutan rakyat.
3. Pola kemitraan (Kredit Usaha Hutan Rakyat); hutan rakyat dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta dengan insentif permodalan berupa kresit kepada rakyat dengan bunga ringan. Dasar pertimbangan kerjasam itu adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat butuh bantuan modal kerja. Pola kemitraan ini dilakukan dengan membrikan bantuan secar penuh melalui perencanaan sampai dengan membagi hasil usaha secara bijaksana, sesuai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat.²³

Pola Pengembangan yang di gunakan oleh Sistem Hutan Kerakyatan ialah Pola Swadaya, yang mana hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau pereorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri. Dengan pola ini masyarakat akan menjadi mandiri,

²³ Rahmawaty, *Op.Cit.* hal 4

dikarenakan masyarakat didorong agar mau dan mampu untuk melaksanakan pembuatan hutan rakyat secara swadaya dengan bimbingan teknis kehutanan.

5. Strategi Pengembangan Hutan Kerakyatan

Pengembangan hutan rakyat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu :

1. Menginventaris hutan rakyat yang telah ada untuk mengetahui sebaran hutan rakyat baik letak, luasan, jenis dan perkiraan potensi yang terkandung didalamnya dalam rangka perwilayahan jenis dan pengembangan selanjutnya.
2. Menginventarisir sasaran pengembangan lokasi hutan rakyat baik lahan kritis yang terlantar, lahan kritis karena solum yang tipis, maupun lahan miring lainnya yang membahayakan lingkungan.
3. Percontohan pengelolaan hutan rakyat menurut berbagai kondisi hutan rakyat yang ada sekarang menuju pengelolaan hutan rakyat yang produktif, lestari dan aman terhadap lingkungan.
4. Penyiapan sarana perangkat lunak baik yang menyangkut produk hukum, pedoman, petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan ditingkat daerah maupun bimbinga dari pusat.
5. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan hutan rakyat dalam bentuk metode, teknologi dan teknik pelaksanaan yang tepat bagi pengembangan hutan rakyat
6. Memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang terdidik dan terlatih

7. Menggerakkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat dan pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat melalui pembentukan kelompok tani yang dinamis
8. Penyuluhan kepada masyarakat baik melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, organisasi pemuda dan pelaku kegiatan hutan rakyat lainnya dalam rangka membentuk jaringan pembinaan.
9. Menyamakan persepsi pengelolaan hutan rakyat para pejabat daerah terkait dalam rangka ikut serta menggalakkan partisipasi masyarakat.
10. Mendorong terciptanya pasaran hasil hutan rakyat sehingga terjadi kemudahan bagi masyarakat dan kestabilan dalam pelaksanaannya.
11. Memberikan insentif permodalan dengan bunga ringan melalui kredit usaha hutan rakyat (KUHR) untuk membangun unit usaha hutan rakyat.²⁴

6. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan mempunyai arti proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan

²⁴ Rahmawaty, *Ibid.* hal 4

pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain²⁵

Pengelolaan jika dilihat dari sisi ilmu manajemen, sebenarnya tidak akan jauh berbeda definisinya, karena kata pengelolaan sering disebut juga dengan istilah manajemen. Mengenai hal ini menurut Abd. Rasyad Shaleh, manajemen merupakan proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dalam kelompok tugas itu dan kemudian mengerakkannya ke arah pencapaian tujuan.²⁶

Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam. Yang mana dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk pengelolaan hutan rakyat menurut Undang-undang Republik Indonesia pasal 21 Indonesia No. 41 tahun 1999 meliputi kegiatan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.²⁷ Penjelasan dari bentuk pengelolaan di atas sebagai berikut:

²⁵ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Cetak hal 300

²⁶ Abd. Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*. (Jakarta ; Bulan Bintang. 1993) hal 42

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia pasal 21 Indonesia No. 41 tahun 1999

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu (Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 pasal 22).

2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Usaha pemanfaatan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

3. Rehabilitasi dan reklamasi

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan

diselenggarakan meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi hutan meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

4. Perlindungan hutan dan Konservasi alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, konvensional, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit. Selain itu juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil

hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.²⁸

Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan tidak jauh berbeda dengan pengelolaan hutan seperti biasanya, hanya saja pengelolaan hutan kerakyatan di lakukan bersama masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan, waktu, dan hasil pengelolaan sumber daya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung. Praktik Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) adalah praktik multikultur dimana berbagai jenis tanaman (tanaman pangan, tanaman kayu, dan buah-buahan) ditanam dalam satu hamparan ekosistem.

C. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) merupakan salah satu konsep pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat yang ada di indonesia, dimana partisipasi masyarakat di kawasan hutan tersebut sangatlah berperan peting dalam pengelolaan hutan. Makna partisipasi dalam pengelolaan hutan ini yaitu masyarakat secara aktif terlibat dalam : (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) keterlibatan dalam pengawasan, (3) keterlibatan dimana

²⁸ [http:// donipengalaman9.wordpress.com/2012/03/Landasan Teori – Pengelolaan Hutan di](http://donipengalaman9.wordpress.com/2012/03/Landasan%20Teori-%20Pengelolaan%20Hutan%20di%20Indonesia/) akses pada tanggal 22 Agustus 2018

masyarakat mendapatkan hasil atau manfaat, (4) partisipasi dalam proses pengelolaan.²⁹

Dibentuknya Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yaitu bertujuan untuk dapat menjaga kelestarian hutan dan sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat di kawasan hutan. dalam pengelolaan nya Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) mengedepankan masyarakat sebagai actor utama dalam pengelolaan hutan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan menjadi landasan utama masyarakat untuk mengelola hutan secara bijaksana yaitu pengelolaan hutan yang masih menggunakan teknik-teknik tradisonal atau kearifan lokal yang berkembang di wilayah tersebut.

Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan hutan agar terciptanya kelestarian hutan yaitu meliputi kegiatan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam,³⁰ yang mana telah di jelaskan di pembahasan sebelumnya.

Membicarakan pengelolaan hutan maka akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangibile* yang dirasakan

²⁹ Dr. Oos M. Anwas , *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Cetakan ke 2 (Bandung ; Alfabeta 2014) hal 93

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 pasal 21

secara tidak langsung.³¹ Manfaat langsung seperti vegetasi, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.

Agar manfaat sumber daya hutan terjaga kelestariannya dan dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, maka dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menggunakan pengembangan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan masyarakat yang memperhatikan aspek lingkungan.

Unsur-unsur pelestarian lingkungan telah dimasukan di dalam suatu program pembangunan. Terutama yang menyangkut mobilisasi sumber daya alam dan aspek konservasi, agar penggunaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana.³² Sehingga mencegah terjadi kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya hutan, yang hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial saja tanpa memperhitungkan aspek lingkungan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas pada masyarakatnya. Bentuk kegiatan pengembangan kapasitas pada masyarakat berupah kegiatan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau potensi yang terdapat di

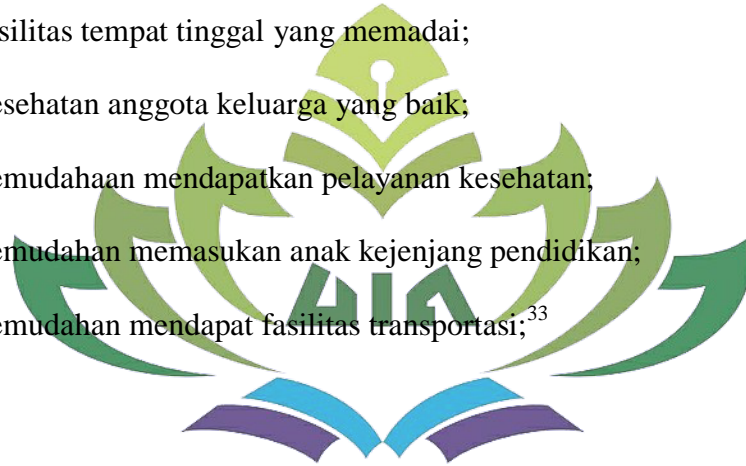
³¹ Rahmawaty, *Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat*, (Univ. Sumatera Utara: e-USU Repository, 2014) Skripsi Bab II, hal 1

³² Seotomo, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hal 191

kawasan tersebut. pelatihan tersebut memiliki tujuan sebagai bentuk penyadaran masyarakat untuk berubah dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Perubahan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik merupakan indicator masyarakat yang telah sejahtera, karena telah mencakupi;

1. Meningkatnya pendapatan;
2. Tercukupi konsumsi atau pengeluaran keluarga;
3. Keadaan tempat tinggal yang baik;
4. Fasilitas tempat tinggal yang memadai;
5. Kesehatan anggota keluarga yang baik;
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan;
7. Kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan;
8. Kemudahan mendapat fasilitas transportasi;³³



³³ Lathifa Octarina, “*Analisis Kesejahteraan Nelayan di Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung,*” (Skripsi Program Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung, 2014) hal 15

BAB III

SISTEM HUTAN KERAKYATAN (SHK) LESTARI DESA HANURA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Peswaran

1. Sejarah Kelompok Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari

Awal pendirian Kelompok SHK Lestari di Desa Hanura dilatar belakangi oleh permasalahan izin pengelolaan di Dusun Muara Tiga Desa Hurun atau yang dikenal sekarang dengan Desa Hanura,

Sejak tahun 1959, kawasan Register 19 di Desa Hurun, Dusun IV (Muara Tiga) merupakan kawasan hutan kekuasaan Dinas Kehutanan. Pada tahun 1959 terdapat beberapa orang warga pendatang yang membuka kawasan tersebut.

Tahun 1962, perkampungan Dusun IV Muara Tiga mulai berkembang. Penduduk yang beretnis Jawa, Sunda Banten, Semendo (Sumatera Selatan) dan etnis Lampung (pribumi) mulai membuka hutan untuk dijadikan perkebunan kopi, Lambat laun jumlah penduduk makin banyak.¹

Pada tahun 1969 penduduk Muara Tiga yang bernama Sarkawi mengajukan permohonan izin membuka hutan. Proses perubahan hak pengusahaan tanah pernah terjadi ketika Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Rupawi dengan

¹ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018 Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

No:3116962 Desa Hurun Hak milik No. 226/TB, gambar tanah No. 283 Tahun 1977 Kecamatan Teluk Betung/Panjang atas nama pemegang hak Rupawi bin Siarim tetanggal 15 Agustus 1977, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk I Lampung Tanggal 29 Juli 1977 No AG 230/DA 339/SK/HM/77 gambar tanah No.283/1977 tetanggal 7 Juni 1977 dengan luas 20.000 m2 yang ditanda tangani Bupati Lampung Selatan/Kepala Sub Direktorat Agraria/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.²

Dengan keluarnya sertifikat tersebut masyarakat beranggapan bahwa wilayah itu bisa untuk dijadikan tanah garapan karena tidak termasuk dalam wilayah hutan lindung. Namun pada tanggal 17 April 1998, pihak Dinas Kehutanan melalui aparat jagawana tiba-tiba melakukan pengusiran terhadap warga Dusun Muara Tiga secara paksa dan tidak manusiawi dengan membakar rumah beserta isinya dengan alasan mereka adalah penduduk liar. Pada waktu itu masyarakat memilih diam dari pada berhadapan dengan laras panjang (senapan). Tercatat Ratusan rumah mereka rusak terbakar dan lebih dari 100 KK mengungsi. Peristiwa kekerasan tersebut membuat masyarakat seperti pencuri dikebun sendiri. Suasana yang mencekam mereka jalani berbulan-bulan. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dratis karena warga tidak memanen kopi.

Hingga tahun 1998, ketika arus reformasi digulirkan oleh mahasiswa, ternyata memberi sebersit harapan dan keberanian untuk dapat kembali lagi

² Dokumentasi Profil SHK Lestari

ketempat yang telah beberapa bulan mereka tinggalkan. Lebih-lebih lagi ketika dikeluarkannya SK Menhutbun No 677/1998 tentang pengelolaan Hutan Kemesyarakatan (HKm), maka mereka kembali berjuang untuk mempertahankan lahan yang sudah sekian tahun mereka garap. Sampai tahun 2001 mereka terus berusaha untuk mendapatkan izin HKm, namun izin tersebut tak kunjung turun, bahkan seolah-olah proposal yang mereka masukkan ke Dinas Kehutan seperti di peti eskan. Masyarakat mulai ragu dengan HKm.

Bulan Juli 2001 Datanglah LSM PUSSbik mulai berkenalan dan mendekatkan diri dengan masyarakat, bersama masyarakat mencoba untuk mencari jalan keluar. Konsep lain pun ditawarkan oleh PUSSbik. Sistem Hutan Kerakyatan adalah konsep yang ditawarkan oleh PUSSbik. Kemudian PUSSbik mengajak LSM WALHI Lampung untuk mensosialisasikan SHK (Sistim Hutan Kerakyatan). Melalui beberapa kali diskusi yang melibatkan masyarakat akhirnya masyarakat memutuskan memilih SHK sebagai model pengelolaan hutan.³

³ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

2. Kelembagaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

Organisasi Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Merupakan wadah organisasi kerakyatan gabungan Kelompok Tani Pengelola Kawasan Hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung. Organisasi SHK Lestari berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk pada tanggal 14 Februari 2002.⁴

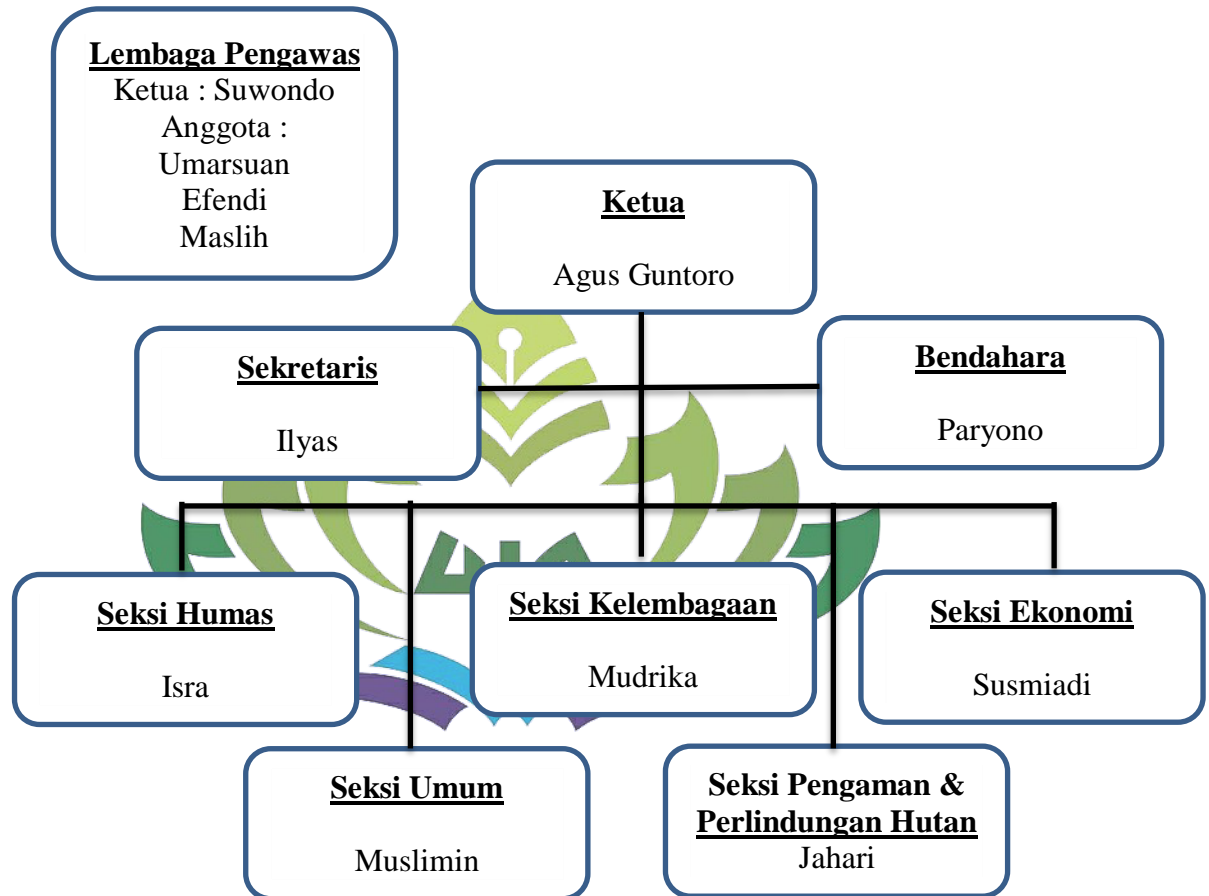
Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan merupakan visi misi besar organisasi.⁵ Berbagai kegiatan dan program internal kelembagaan telah dilakukan oleh organisasi SHK Lestari dari kegiatan Advokasi Penggarap, Program Pemberdayaan dan Pendidikan Kritis hingga program-program lapangan/lingkungan berupa penanaman dan rehabilitasi lahan kritis diareal wilayah maupun diluar wilayah kelola rakyat.

Keberadaan Organisasi SHK Lestari hingga saat ini tidak saja sebagai alat kelengkapan warga masyarakat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, namun sudah banyak memberikan kontribusi Ekonomi maupun Ekologi bagi masyarakat dan Pemerintah dalam Model Pengelolaan Hutan Lestari dan membangun Pengelolaan Hutan berbasis Rakyat (Social Forestry).

⁴ Dokumentasi Profil SHK Lestari

⁵ Dokumentasi Profil SHK Lestari

3. Struktur Pengurus Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten



Sumber: Profil Kelompok SHK Lestari

4. Keadaan SHK Lestari dan Sarana Prasarana

a. Keadaan Geografis

1) Letak Wilayah

Kelompok SHK Lestari terletak didalam kawasan Taman hutan Raya Wan Abdul Rahman dan berada pada posisi $105^{\circ},15'$ - $105^{\circ},15$. Tingkat kemiringan berkisar antara $5-40^{\circ}$ barada pada ketinggian 250 - 300 M dpl, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Utara : Kali Simong dan Desa Tanjung Agung

Timur : Dusun Umbul Sembung dan Dusun Way Tabuh

Desa Cilimus

Selatan : Sungai Way Sabu Desa Batu Menyan

Barat : Kampung Pematang Minggu Desa Hurun dan

Dusun Sungkai Desa SukaJaya Lempasing⁶

2) Luas Wilayah

Kelompok SHK Lestari memiliki wilayah kelola seluas 829 Ha (Berdasarkan pemetaan partisipatif Th 2010), berikut adalah rincian luas wilayah kelola Kelompok SHK Lestari di setiap kelompok-kelompoknya :

⁶ Dokumentasi Profil SHK Lestari

Tabel 1. Luas Wilayah Kelola SHK Lestari

No	Nama Kelompok	Luas Wilayah Kelola
1	Kelompok Tersenyum	115,5 Hektar
2	Kelompok Sejati	136.5 Hektar
3	Kelompok Karya Mukti	158,5 Hektar
4	Kelompok Sri Lestari	98,25 Hektar
5	Kelompok Puja Kusuma	104 Hektar
6	Kelompok Cinta Damai	72 hektar
7	Kelompok Karya Makmur	144,25 Hektar

Sumber: Dokumentasi Kelompok SHK Lestari, Dicatat Pada Februari 2016

3) Karakteristik Wilayah

Wilayah kelola SHK Lestari pada khususnya beriklim tropis basah, suhu rata-rata mencapai 20-29°C dengan curah hujan berkisar antara 2500-3000 mm/tahun. Secara geografis diwilayah pengelolaan mempunyai enam mata air yang mengalir ke sungai besar yaitu Way Sabu yang bermuara ke Teluk Lampung. Jenis tanah sebagian gembur yang cukup subur membantu percepatan tanaman masyarakat.

4) Aksesibilitas

Jarak dari Pemerintahan Desa : 1 Km
 Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
 Jarak dari Ibukota Kabupaten : 69 Km
 Jarak dari Ibukota Propinsi : 15 Km⁷

⁷ Dokumentasi Profil SHK Lestari

b. Demografi

Sampai saat ini Keanggotaan Organisasi SHK Lestari terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kelompok dan 22 Blok hamparan wilayah kelola dengan anggota sebanyak 705 penggarap. Dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Anggota SHK Lestari

Kelompok	Jumlah KK (Suami)	Jumlah Istri	Jumlah Anak		Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total Penduduk
			> 5 Th	Balita	Laki-2	Perempuan	
Tersenyum	50	35	72	10	100	67	167
Puja Kesuma	36	34	49	13	70	62	132
Cinta Damai	14	14	12	5	31	22	53
Sri Lestari	16	14	25	1	32	5	56
Sejati	35	31	21	7	40	54	94
Karya Mukti	40	40	95	25	105	50	155
Karya Makmur	18	10	20	8	42	25	67
Σ Total	209	178	294	69	420	285	705

Sumber: Profil Kelompok SHK Lestari Dicatat Pada Ferbuari 2016

Ke 705 Anggota tersebut tidak hanya berasal dari desa Hanura saja, tetapi tersebar di desa lainnya antara lain Desa Cilimus, Desa Hurun, Desa Lempasing. Diantara desa tersebut Desa Cilimus memiliki anggota

terbanyak lalu desa Hanura menempati posisi ke dua sebagai anggota terbanyak.⁸

c. Kondisi Sosial Budaya

Komunitas yang tergabung dalam kelompok SHK Lestari cukup beragam etnik ada semendo, sunda, banten, jawa dan lampung sehingga bentuk feodalisme sebagai mana terdapat pada adat masih berlaku, seperti halnya di dalam kebudayaan lampung terdapat sistem hirarki pada masyarakatnya, ditandai dengan adanya panggilan nama adat di setiap orang yang bersuku lampung. meskipun begitu di kelompok SHK Lestari ini tidak dikenal latar belakang suku, bahasa, keragaman yang berada tetap menjadikan komunitas anggota kelompok SHK Lestari merasa setara dan sederajat.

Adat istiadat hingga saat ini masih digunakan meski tidak seintens diwilayah asalnya. Penggunaan acara adat tergantung masing-masing suku yang bersangkutan. Acara adat biasanya di gunakan pada saat mendirikan rumah, melakukan perkawinan, khitanan dan pasca panen atau menjelang penanaman padi ladang.

Tidak hanya di dalam suatu moment kegiatan penting saja nuansa adat istiadat di lakukan. Tetapi di dalam memilih tanaman untuk berkebunpun, adat istiadat masih dibudayakan. Contohnya, dalam

⁸ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

pemilihan tanaman anggota SHK Lestari sangatlah masih kental dengan kebudayaan atau kebiasaan suku masyarakat berasal. Kopi ditaman oleh warga yang bersuku Semendo dan tangkil kebanyakan ditanam oleh warga yang bersuku Banten. Ini menandakan masih sangat kental dengan tanaman nenek moyang masing-masing, sedangkan untuk suku Lampung dan Jawa kebanyakan menanam kopi, tapi ada beberapa juga yang menanam lainnya.⁹

Aturan adat yang masih berlaku hingga sekarang adalah buang air kecil di ulu tulung. Ulu tulung adalah istilah masyarakat Sumatra Selatan yaitu sumber mata air yang di larang diambil ikannya atau dikencingin karena menurut kepercayaan mereka penunggunya akan marah.

Pengadilan adat yang sesungguhnya tidak ada. Bila terdapat penduduk dari etnis tertentu melakukan tindakan tercela dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya mencuri, maka sipencuri akan di adili oleh tokoh adat mereka masing-masing. Sanksi yang diberikan di sesuaikan dengan tingkat kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu, apabila ada warga yang ketahuan berzina akan diberi sanksi memotong kambing untuk membersihkan talang dan membuang sial, serta warga yang melakukan zina diusir dari kampung

⁹ Dokumentasi Profil SHK Lestari

d. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama yang di peluk oleh Anggota SHK Lestari baik yang bersuku sunda, jawa, semendo, dan lampung secara keseluruhan adalah beragama islam dan dalam menerapkan ibadah nya, kebanyakan dari mereka mengikuti ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan Nahdlotul Ulama (NU). Contohnya yaitu Anggota SHK Lestari rutin mengadakan pengajian, shalawatan, istighotsha dll yang mana dipimpin oleh seorang Kiai atau Tokoh Agama di daerah tersebut, begitu juga dengan kesenian semendo yaitu rabanan yang masih terlestarikan sampai sekarang. Dari kedua kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antar sesama anggota SHK Lestari.

Keyakinan dalam menjalankan agama cukup tinggi. Ini di buktikan dengan adanya keinginan kuat penduduk untuk dapat menunaikan ibadah haji disamping telah menjalankan syariat islam lainnya.¹⁰ Ini menandakan anggota SHK Lestari memiliki jiwa semangat dalam melaksanakan ibadah. Jiwa Semangat ini juga yang menjadi latar belakang para Anggota SHK Lestari rajin dan tekun dalam mencari nafkah atau berkerja. Dimana anggota SHK Lestari memaksimalkan potensi lahan yang mereka miliki dengan cara metode menanam campuran. Selain itu, anggota SHK Lestari juga memaksimalkan hasil komoditas yang mereka tanam menjadi suatu produk makanan riangan.

¹⁰ Dokumentasi Profil SHK Lestari

Dari kondisi yang dilakukan oleh anggota SHK Lestari dalam memaksimalkan potensi yang mereka miliki sangat berkaitan dengan apa yang telah di ajarkan oleh islam dalam al-quran yang mengatakan “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Ar-Ra’d : 11).¹¹

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencarian utama anggota SHK Lesatri adalah berkebun, bertani, dan berternak. Di bawah ini adalah tabel mata pencarian anggota SHK Lestari.

Tabel 3. Mata Pencarian Aggota SHK Lestari

No	Mata Pencarian	Jumlah		Total	Persentase %
		Laki-laki	Perempuan		
1	Berkebun	258	125	383	54,32
2	Bertani	115	97	212	30,07
3	Berternak	12	5	17	2,41
4	Berdagang	7	20	27	3,82
5	Lain-lainya	28	38	66	9,36
Total		420	285	705	100

Sumber: Profil Kelompok SHK Lestari Dicatat Pada Ferbuari 2016

Perkebunan anggota terdiri dari tanaman keras berupa kopi, coklat, cengkeh, pala, lada, alpukat, jengkol, dadap, tangkil, petai, hingga durian. Sambil menunggu hasil panen tahunan, anggota menanam tanaman

¹¹ Al-quran dan terjemahannya,

semusim hingga tanaman tahunan panen tiba. Mata pencarian utama bersumber dari hasil perkebunan berupa kopi, coklat, durian, kemiri, pala, melinjo, nira aren dan pisang serta sedikit sumber dari pendapatan yang berasal dari ternak kambing, ikan dan ayam maupun ternak lainnya.¹²

Dari kegiatan berkebun tersebut tingkat penghasilan anggota mengalami perubahan yang signifikan, anggota dapat memenuhi kebutuhan pokok dari penghasilan mereka berkebun.

Bertahap masyarakat yang sudah mengikat diri melalui kelompok SHK Lestari membangun kehidupan dari keberagaman hasil perkebunan yang berasaskan kelestarian hutan, hal ini bahkan menjadi dasar masyarakat membangun perekonomian rakyat. Masyarakat yang tadinya mengandalkan pada hasil buruan menggantungkan senjatanya untuk berkebun, masyarakat pun tidak lagi mengenal jual beli lahan di daerah tersebut karena sadar keberadaan mereka sangat tergantung pada kelestarian hutan di daerah tersebut.

Di atas lahan seluas 829 Ha, para penggarap lahan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman ini menganut pola SHK untuk menggantungkan kehidupan perekonomian masyarakat, dengan pola penanaman yang sangat beragam tidak mengandalkan pada satu jenis tanaman saja. Masyarakat berupaya membangun ekonomi rakyat yang

¹² Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

mandiri, tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Hasil kebun rakyat dikelola dengan cukup baik hingga saat ini, para penggarap lahan berupaya membangun struktur ekonomi rakyat yang mandiri dan hutan lestari, agar tercipta perekonomian yang berbasiskan hutan rakyat dan kelestarian alam.

B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran

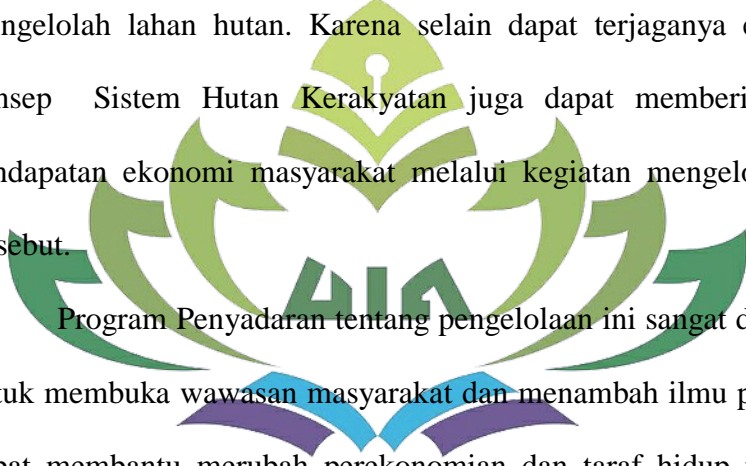
Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat lokal memiliki kesadaran dan inisiatif sendiri serta memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya mereka, maka di dalam proses pemberdayaan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan sangat diperlukan. Dan begitupula proses pemberdayaan masyarakat yang ada di Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari, masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di setiap tahap-tahapannya. Berikut penjelasan tahap-tahap pemberdayaan sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Tahap Penyadaran adalah tahap awal dalam suatu kegiatan pemberdayaan, dimana di tahap ini dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti dan memahami Sistem Hutan Kerakyatan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di Hutan Wan Abdurahman yaitu persoalan tentang hak lahan warga dengan pihak pemerintahan, dalam hal kaitan ini yaitu dinas kehutanan provinsi lampung, selain persoalan tersebut

Sistem Hutan Kerakyatan dapat juga menjadi solusi persoalan kesejahteraan masyarakat yang ada di masyarakat kawasan hutan Wan Abdurahman.

Maksud dari kegiatan sosialisasi ini yaitu dimana masyarakat akan diberikan wawasan pengetahuan tentang pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan. wawasan dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu tentang pentingnya konsep pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, yaitu masyarakat menjadi peran utama dalam menjaga kelestarian hutan dan mengelolah lahan hutan. Karena selain dapat terjaganya ekosistem hutan, konsep Sistem Hutan Kerakyatan juga dapat memberikan penghasilan pendapatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan mengelolah lahan hutan tersebut.



Program Penyadaran tentang pengelolaan ini sangat diperlukan karena untuk membuka wawasan masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan serta dapat membantu merubah perekonomian dan taraf hidup masyarakat yang tadinya mengandalkan pada hasil buruan menggantungkan senjatanya untuk berkebun, masyarakat pun tidak lagi mengenal jual beli lahan di daerah tersebut karena sadar keberadaan mereka sangat tergantung pada kelestarian hutan di daerah tersebut.

Penyadaran ini dilakukan oleh LSM WALHI pada bulan juli 2001, diawali dengan datang nya LSM PUSSbik (Pusat Study Strategi dan Kebijakan) untuk mencoba bersama masyarakat mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di kawasan hutan tersebut. maka PUSSbik menawarkan Konsep

Sistem Hutan Kerakyatan dan mengajak LSM WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Lampung untuk mensosialisasikan konsep tersebut. Tahap sosialisasi dilakukan dengan cara menjelaskan langsung atau berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengenalkan konsep pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan. Adapun yang di sosialisasikan oleh Walhi yaitu menjelaskan tentang garis besar Konsep pengelolaan hutan Sistem Hutan Kerakyatan bagaimana pengelolaan nya, dan memberikan contoh-contoh daerah yang telah menggunakan konsep Sistem Hutan Kerakyatan.¹³

Dibawah ini merupakan tabel tahap-tahap atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana lingkungan hidup provinsi lampung (WALHI Lampung) dalam mensosialisasikan Konsep Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Hutan Wan Aburahaman khususnya desa hanura kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran dari tahap membangun kontak kepada masyarakat sekitar hingga sampai masyarakat dan LSM Wahana Lingkungan provinsi Lampung membentuk kelompok Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari secara bersama-sama ;

¹³ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 10 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari

Tabel 4. Tahap Dan Langkah Kegiatan Sosialisasi Sistem Hutan Kerakyatan

Tahap	Kegiatan	Tujuan
Membangun Kontak Person	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan diri (identitas) 2. Menjelaskan asal lembaga/institusi 3. Menjelaskan tujuan kehadiran 	Untuk memberikan keyakinan bahwa kita adalah bukan orang yang hendak melakukan tindakan jahat terhadap mereka dan menghindari kecurigaan rakyat, terlebih lagi apabila komunitas setempat sedang menghadapi konflik
Membangun Kontak Dengan Tokoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh Adat 2. Tokoh Agama 3. Tokoh Masyarakat (KADUS) 4. Pertemuan bersama tokoh (untuk menggali sejarah kampung) 	Memastikan siapa yang disebut sebagai tokoh dan memiliki pengaruh ditengah masyarakat dan berperilaku baik untuk dijadikan mitra utama dalam pengembangan sistem hutan kerakyatan (SHK)
Interaksi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat dalam kegiatan ibu-ibu 2. Ikut olah raga bersama pemuda kampung 3. Terlibat dalam kegiatan keagamaan (pengajian, kenduri dll) 4. Bermain bersama anak – anak 5. Mengunjungi perkampungan dan perladangan petani 	Memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa kita adalah sahabat mereka dan ingin belajar bersama mereka tentang norma sosial yang berkembang dikomunitas local
Pertemuan Kampung tahap I	<p>Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan topik apa yang akan dibahas (sosialisasi SHK) 2. Kapan dan dimana akan dilakukan 	Kegiatan yang akan dilakukan kedepan bukan inisiatif WALHI semata tetapi inisiatif bersama dan penyelenggaraan aktivitas

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembagian peran (WALHI dan rakyat) 4. Menetapkan bentuk/pola yang akan dilakukan 5. Menentukan berbagai kebutuhan dan pengadaannya 	merupakan sebuah kebutuhan yang dianggap penting oleh rakyat sehingga berbagai keperluan akan dipikul secara gotong royong
Pertemuan Kampung tahap. II	Sosialisasi SHK <ul style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan Tim 2. Perkenalan warga 3. Mengenalkan konsep SHK 4. Menggali permasalahan/kasus utama 5. Menggali upaya apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya 6. Menggali hambatan utama yang dialami dan tersulit 7. Menggali pola budidaya yang dilakukan rakyat 8. Menampilkan contoh pengelolaan melalui pola SHK 9. Berbagi pengalaman 10. Perencanaan agenda kedepan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meyakinkan bahwa SHK merupakan sebuah model pengelolaan sumberdaya kehutanan yang muncul dari rakyat dan telah diwariskan oleh generasi terdahulu yang mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat 2. Memastikan bahwa rakyat secara bulat dapat menerima dan mau melaksanakan prinsip-prinsip SHK dalam pengelolaan SDH
Muswarah Kampung Besar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review hasil pertemuan awal untuk memperjelas substansi 2. Membangun kesepakatan bersama untuk SHK 3. Deklarasi penerimaan SHK sebagai model pengelolaan hutan 4. Menentukan agenda kedepan 	Memastikan secara utuh dan bulat bahwa rakyat bersedia dengan sungguh hati akan melaksanakan model dan prinsip SHK
Membangun Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan model kelembagaan (KSM, Kelompok Tani, OR) 	Mempersiapkan perangkat kelembagaan sebagai arahan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menggali aturan atau norma yang sudah ada di masyarakat 3. Membuat draf aturan kelompok (Hak, Kewajiban, Sanksi dan Larangan) 4. Merumuskan draf nilai-nilai kelembagaan 5. Merumuskan draf arah dan garis perjuangan 6. Merumuskan draf mekanisme sumber keuangan organisasi 7. Menentukan kebutuhan utama dan mendesak 	sementara sebelum terbentuk perangkat kelembagaan yang kuat
Musyawarah Kelompok Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi dan pengesahan aturan kelompok 2. Menyusun program kerja (prioritas, menengah dan panjang) 3. Menyusun jadwal kerja 4. Menentukan mekanisme kerja dan penerimaan anggota 5. Menentukan struktur kelembagaan SHK 6. Menentukan nama kelompok besar dan kelompok SHK ditingkat padukuhan 7. Pemilihan ketua kelompok pedukuhan 8. Pemilihan komponen adal/Lokal 9. Pemilihan komponan ulama 10. Pemilihan ketua kelompok besar SHK 	Membentuk konstitusi baru dan segala kelengkapan perangkat kelembagaan sebagai rambu utama dalam menjalankan mandat lembaga

Sumber : Dokumentasi WALHI Lampung Dicatat Pada tahun 2001

Menurut salah satu masyarakat desa Muara Tiga yang sekarang dikenal dengan desa Hanura yaitu bapak Royani mengatakan bahwa pada bulan oktober akhir di tahun 2001. Perwakilan dari Walhi lampung datang dan memperkenalkan diri mereka kepada kami masyarakat Muara Tiga atas rekomendasi dari pihak PUSsbik. Dalam kurun waktu 5 bulan mereka sering melakukan pertemuan kepada kami warga Muara Tiga sebulan sekali untuk mensosialisasi dan mendiskusikan pengelolaan hutan yang menggunakan Sistem Hutan Kerakyatan. Sehingga pada Ferbuari 2002 dengan kebulatan tekad kami masyarakat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh warga dan menyatakan untuk memilih SHK sebagai arahan dalam mengelola hutan dan wadah perjuangan mereka dalam mempertahankan hak kelola.¹⁴

Dari tabel dan penjelasan diatas dapat diketahui dari setiap tahap-tahapnya interaksi Walhi dan Masyarakat sangat bersenambungan demi berjalannya program pengelolaan hutan tersebut. masyarakat di ikut sertakan dalam setiap diskusi atau musyawarah dalam membahas pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan, dimana tujuan nya ialah agar masyarakat dapat percaya dan memahami dengan jelas bagaimana pola kerja Sistem Hutan Kerakyatan.

Dari setiap Diskusi, masyarakat mulai tertarik dengan pengelolaan hutan yang menggunakan konsep Sistem Hutan Kerakyatan, karena konsep pengelolaan hutan tersebut tidak hanya untuk menjaga kelestarian hutan tetapi dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengelolah Sumber Daya Hutan.

¹⁴ Royani (Anggota SHK Lestari, Talang Sejati) Wawancara tanggal 17 Ferbuari 2019

Selain itu, Ketertarikan mereka adalah Sistem Hutan Kerakyatan tidak mengenal birokrasi karena Sistem Hutan Kerakyatan adalah pola pengelolaan hutan yang sepenuhnya diserahkan kepada rakyat.

Menurut bapak Agus Guntoro, dengan adanya Sistem Hutan Kerakyatan ini masyarakat tersadarkan hubungan mereka dengan hutan sangatlah erat, hutan sebagai matapencarian mereka dan juga sebagai pelindung masyarakat dari bencana. Masyarakat juga merasa terpecahkan nya persoalan masalah utama masyarakat yaitu ketidak tenangan mereka dalam mengelola hutan, karena beberapa kali mengalami pengusiran di masa lalu.¹⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti tahap penyadaran ini cukup berhasil di lihat banyak nya masyarakat di sekitar hutan Wan Abdurahman yang ikut bergabung dengan SHK Lestari yaitu berjumlah 702 orang. Angka tersebut membuktikan bahwa Konsep Pengelolaan Hutan SHK telah di percayai sepenuhnya oleh masyarakat di kawasan hutan Wan Abudrahman. mereka menyadari bahwa kehidupan mereka sangat bergantung terhadap keberadaan hutan Wan Abdurahman. masyarakat pun tidak lagi mengenal jual beli lahan di daerah tersebut karena sadar keberadaan mereka sangat tergantung pada kelestarian hutan di daerah tersebut, dan masyarakat mencoba untuk berkebun di lahan tersebut.¹⁶

¹⁵ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

¹⁶ Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 10 Agustus 2018

Menjelaskan lebih lanjut dari pengamatan peneliti di atas menurut pernyataan bapak Iswadi yang menyatakan masyarakat dapat terbantu pendapatannya dengan cara pengelolaan lahan hutan yang diterapkan oleh SHK Lestari dengan pola tanam yang dilakukan adalah kebun campuran, yaitu dalam satu hamparan bukan hanya menanam satu jenis tapi bermacam-macam.¹⁷

Anggota SHK Lestari menggarap lahan hutan dengan menanam jenis pohon bertajuk tinggi seperti kemiri, jati, bungur. Gayam, durian, petai dan lain-lain sebagai pohon pelindung atau naungan tanaman utama. Selain itu mereka juga menanam pohon bertajuk sedang seperti kopi, melinjo, cengkeh, coklat, alpukat, mangga, pala dan lain-lain yang mana sebagai tanaman utama. Pada tajuk rendah mereka menanam kacang panjang, kacang tanah, vanili, cabe, lada dan padi ladang.¹⁸

Dalam pemilihan tanaman anggota SHK Lestari sangatlah masih kental dengan kebudayaan atau kebiasaan suku masyarakat berasal. Kopi ditanam oleh warga yang bersuku Semendo dan tangkil kebanyakan ditanam oleh warga yang bersuku Banten. Ini menandakan masih sangat kental dengan tanaman nenek moyang masing-masing, sedangkan untuk suku

¹⁷ Iswadi (Anggota SHK Lestari, Talang Sejati) Wawancara tanggal 18 Agustus 2018

¹⁸ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 18 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

Lampung dan Jawa kebanyakan menanam kopi, tapi ada beberapa juga yang menanam lainnya.¹⁹

2. Tahap Perencanaan

Keikutsertaan masyarakat tidak hanya berhenti di tahap sosialisasi saja tetapi ikut berpartisipasi dalam tahap pembangunan kelembagaan SHK Lestari yang mana telah dijelaskan di table di atas. Masyarakat ikut dalam mengambil keputusan dalam menentukan suatu perencanaan atau kebijakan yang akan diterapkan di SHK Lestari.

Aspirasi, saran dan solusi masyarakat dalam suatu perencanaan atau kebijakan yang ada di SHK Lestari dapat disampaikan di suatu forum resmi, SHK Lestari sendiri memiliki beberapa Forum resmi antara lain yaitu Musyawarah Besar Anggota yaitu suatu forum anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam SHK Lestari yang diadakan dua tahun sekali. Musyawarah Pengurus Induk Kelompok Kecil diadakan 1 (satu) bulan sekali dan diselenggarakan oleh Kelompok Kecil secara bergiliran, Rapat Evaluasi Pengurus, Rapat Dewan Pengawas dan dewan Penasehat.²⁰

Di dalam forum-forum tersebut masyarakat dapat menyalurkan pendapat atau aspirasi mereka di dalam suatu perencanaan program kerja SHK Lestari.

¹⁹ Jahari (Anggota SHK Lestari, Talang Cinta Damai), Wawancara 18 Agustus 2018

²⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SHK Lestari BAB VIII Pasal 36-41

Menurut Bapak Mukri perwakilan Walhi Lampung, mengatakan keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program kerja pengelolaan hutan sangat wajib diikuti sertakan, karena masyarakat yang mengetahui bagaimana kondisi lapangan dan potensi yang ada. Sehingga keputusan masyarakat perlu diperhitungkan dalam perencanaan program kerja, pada akhirnya juga masyarakat yang melaksanakan dan masyarakat yang merasakan.²¹

Dalam menyusun rencana program kerja, masyarakat selalu memperhatikan aspek kelestarian hutan, dengan begitu apabila program kerja berjalan dengan baik, maka kelestarian hutanpun terjaga dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus, dalam perencanaan program kerja SHK Lestari menerapkan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.²² Berikut tabel penjelasan perencanaan program SHK Lestari;

Tabel 5. Perencanaan Program SHK Lestari

No	Jangka Perencanaan	Penjelasan	Kegiatan
1	Jangka Panjang	Program jangka panjang umumnya merupakan program kegiatan SHK Lestari yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih lama dari 1 (satu) tahun.	1. Penanaman tanaman tajuk tinggi seperti durian, petai, dadap sebagai pohon pelindung tanaman utama tau tajuk sedang.

²¹ Mukri (Perwakilan Pengurus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2018

²² Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 18 Agustus 2018

		Program – program kegiatan ini terus berlangsung dan menjadi aktivitas regular organisasi, dan dijalankan dalam waktu yang panjang. Sehingga kita tidak dapat menilai hasil kerja tersebut dalam waktu yang singkat.	2. Penanaman tanaman utama atau tajuk sedang seperti kopi, coklat melinjo. 3. Pengembangan kapasitas masyarakat dengan melakukan pelatihan – pelatihan. 4. Pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan cara kegiatan usaha bersama.
2	Jangka Menengah	Program jangka menengah dilaksanakan enam bulan sampai satu tahun	1. Menjalin kerjasama dengan Lembaga terkait baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang memiliki visi misi yang sama 2. Promosi dan mengkampanyekan konsep SHK.
3	Jangka Pendek	Program jangka pendek dilaksanakan kurun waktu antara pertiga bulan sampai enam bulan	Pengadaan Fasilitas sarana dan prsarana untuk para petani SHK Lestari seperti gubuk, jalan setapak menuju lahan garapan dll.

Sumber : Hasil Wawancara yang di olah peneliti pada tanggal 18 Agustus 2018

Menurut Bapak Juniar berdasarkan hasil wawancara tentang adanya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan ialah dapat memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat contohnya dalam hal memberi pendapat ataupun mengambil keputusan. Masyarakat pada awalnya sangat takut untuk menyuarakan suara karena merasa tidak percaya diri dan takut salah dalam mengambil keputusan sehingga apatis dalam menanggapi suatu program

pembangunan, tetapi dengan proses keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program di SHK Lestari perlahan masyarakat dapat percaya diri dalam menyuarkan pendapatannya.²³

Dampak lain diikuti sertakan masyarakat dalam perencanaan ialah terbangunnya komitmen bersama masyarakat SHK Lestari di kawasan Hutan Wan Abdurahman. Karena dalam hal ini masyarakat yang merencanakan maka masyarakat harus dapat bertanggung jawab bersama-sama akan kegiatan pengelolaan hutan tersebut.

Bentuk komitmen anggota SHK Lestari dalam pengelolaan hutan Menurut bapak Royani ialah membayar iuran kelompok setiap tahunnya yang disesuaikan berdasarkan potensi, luas lahan dan pendapatan pertahunnya. Bentuk komitmen lainnya yaitu setiap kebun 1 hektar, anggota SHK Lestari harus menanam minimal 20 batang tanaman Durian, kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan jangka panjang yaitu menanam tanaman tajuk tinggi sebagai pelindung tanaman utama.²⁴

Tak hanya dua komitmen tersebut saja, berdasarkan penuturan bapak Joni di dalam SHK Lestari masih memiliki delapan komitmen atau kewajiban yang wajib dijalankan oleh anggotanya yang telah diterangkan di AdRt SHK Lestari antara lain; Keterbukaan baik itu sesama anggota atau pihak lain, Gotong royong dan saling tolong menolong terhadap sesama petani.

²³ Juniar (Anggota SHK Lestari, Talang Cinta Damai) Wawancara tanggal 18 Agustus 2018

²⁴ Royani (Anggota SHK Lestari, Talang Sejati) Wawancara tanggal 18 Agustus 2018

Mengedepankan bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan. Menjaga hutan Wan Abdurahman yang di Konservasi. Terakhir yaitu Mematahui aturan kelompok.²⁵

Komitmen anggota SHK Lestari di atas menurut pengamatan observasi peneliti telah di lakukan oleh mereka dengan baik, dilihat dari rutin nya pembayaran iuran kelompok yang telah ditetapkan dan terjaganya kelestarian hutan wan abdurahman. Komitmen-komitmen tersebut bertujuan agar perencanaan pengelolaan hutan yang telah mereka racang berjalan sebagai mana mestinya.²⁶

Menjelaskan lebih lanjut tentang komitmen anggota dalam mematuhi atauran kelompok, menurut bapak Agus Guntoro ketua SHK Lestari memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota yaitu dilarang menyetrum dan meracun ikan di sungai, tidak boleh menebang pohon di pinggir sungai atau mata air, tidak boleh membunuh satwa, menggeser batas kebun, tidak boleh melepas binatang ternak di hutan dan tidak boleh melakukan pembangunan baik di sungai maupun di darat.²⁷

Sedangkan Sanksi yang mereka terima apabila melakukan pelanggaran antara lain; hukumannya harus mengganti tiga kali lipat harga pohon tersebut lalu dilakukan penyitaan dan tentu si pelanggar diharuskan

²⁵ Joniardi (Anggota SHK Lestari, Talang Tersenyu) Wawancara tanggal 18 Agustus 2018

²⁶ Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 108 Agustus 2018

²⁷ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 18 Agustus 2018

menanam pohon jenis yang sama, si pelanggar diambil sumpahnya dihadapan anggota kelompok untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat mengancam kelestarian hutan, dan diwajibkan menanam pohon minimal 25 tegakan dalam setiap hectare.²⁸

3. Tahap Pengkapasitasan Masyarakat

Tahap pengkapasitasan adalah tahap dimana masyarakat perlu diberdayakan kecakapan dalam mengelola hutan. Terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan system nilai. Tahap ini anggota akan diberikan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang menggunakan Sistem Hutan Kerakyatan. Di SHK Lestari sendiri dalam upaya mengembangkan kapasitas anggota nya dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan hutan di lakukan dengan berbagai cara yaitu dengan dibangunnya *Lerning Center* atau perpustakaan SHK Lestari yang mana terdapat buku-buku bacaan tentang pengelolaan, pengarapan hutan maupun perkebunan, pengetahuan umum dan dilengkapi oleh beberapa seperangkat komputer untuk menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat desa hanura khususnya bagi Anggota SHK Lestari.²⁹

Upaya lain dalam mengembangkan kapasitas anggota yaitu dengan memberikan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut selalu di dukung oleh

²⁸ Anggaran Dasar/Rumah tangga SHK Lestari

²⁹ Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 10 Agustus 2018

Walhi dan Dinas Kehutan Provinsi lampung. Terlihat dari mereka selalu aktif menjadi narasumber di dalam setiap kegiatan SHK Lestari. Menurut Bpk Sumardi bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Kehutan ialah selain menjadi narasumber di setiap kegiatan SHK Lestari, Ditahun 2010 dan 2011 proyek RHL atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan bibit diberikan sebanyak 100.000 lebih, seperti bibit cempaka dan MPTS (Multi Purpose Tree Species) yaitu durian, karet dan pete.³⁰

Di bawah ini adalah kegiatan pengembangan kapasitas anggota yang telah SHK Lestari lakukan;

a. Pendidikan Kader Sistem Hutan Kerakyatan dan Pengetahuan

Organisasi

Kegiatan pendidikan Kader Sistem Hutan Kerakyatan merupakan program pendidikan kaderisasi untuk para anggota SHK Lestari yang di selenggarakan setiap dua minggu sekali. Kegiatan ini menjadi kegiatan dasar dan wajib untuk diikuti oleh seluruh anggota SHK Lestari. Kegiatan pendidikan ini memberikan beberapa pengetahuan dasar kepada anggota SHK Lestari seperti pengetahuan tentang KeSHKan, Pengetahuan Organisasi, dan terakhir pengetahuan Konservasi Alam.³¹

Bentuk kegiatan pendidikan ini menurut Bpk Agus Guntoro selaku Ketua SHK Lestari bersifat flaksibel, maksud nya ialah bisa

³⁰ Sumardi (Perwakilan Dinas Kehutanan Prov, Lampung), Wawancara Pada Tanggal 22 Agustus 2018 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Lampung

³¹ Kadis (Anggota SHK Lestari Talang Sri Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

berbentuk diskusi, seminar, pelatihan ataupun praktek jika diperlukan dan dilihat dari kondisi dan waktu yang ada. Metode penyampaian nya yaitu menggunakan metode ceramah/pemaparan yang di lakukan oleh ahlinya, biasanya perwakilan dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) atau Dinas Kehutan Provinsi Lampung yang menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan tersebut, metode selanjutnya ialah tanya jawab, dimana peserta bertanya kepada narasumber perihal sesuatu yang belum peserta pahami seputar materi yang sedang di bahas.³²

Tabel 6. Materi Pendidikan KeSHKkan

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Pengetahuan Keorganisasian; a. Menjelaskan hirearki struktural b. Menjelaskan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab komponen SHk c. Menjelaskan SOP (standar operasional prosedur)	Pengurus SHK Lestari atau Perwakilan Walhi Lampung.	Sekretariat SHK Lestari
2	Pengetahuan Sistem Hutan Kerakyatan; a. Konsep SHK b. Pola budidaya SHK c. Menggali upaya apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya d. Menggali hambatan utama yang dialami dan solusinya	Perwakilan Walhi Lampung.	Sekretariat SHK Lestari
3	Pengetahuan Kelestarian Alam/ Konservasi Alan;	Perwakilan Dinas Kehutanan Prov.	Sekretariat SHK Lestari

³² Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

		Lampung atau Walhi Lampung.	
--	--	--------------------------------	--

Sumber: Hasil Wawancara yang di olah peneliti pada tanggal 26 Agustus 2018

Tujuan di adakanya Kegiatan pendidikan ini menurut Bpk Mudrika selaku salah satu pengurus SHK Lestari ialah bertujuan agar peserta sebelum melakukan pengelolaan hutan dapat memahami akan hal-hal yang penting dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dan lingkungan tersebut. sehingga mencegah perilaku ekspolitas hutan maupun kegiatan yang dapat merusak hutan. Selain itu bertujuan sebagai media diskusi para peserta dalam menginovasikan pengelolan hutan maupun pengelolaan lahan yang baik dan disesuaikan dengan pola budaya masyarakat setempat.³³

Selanjutnya Bpk Mudrika juga menjelaskan bagaimana respon masyarakat khususnya anggota SHK Lestari terhadap kegiatan pendidikan ini. Menurut beliau respon yang diberikan oleh anggota SHK Lestari sangat positif di lihat dari keantusiasan mereka dalam mengikuti setiap seksi kegiatan pendidikan tersebut. anggota dapat mengoptimal kegiatan pendidikan tersebut sebagai media penambah pengetahuan khusus nya pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.³⁴

³³ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 26 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari

³⁴ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 26 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari

Berikut penjelasan dari Bpk Sowondo salah satu peserta sekaligus anggota SHK Lestari yang mengikuti kegiatan pendidikan tersebut, menurutnya kegiatan pendidikan tersebut diadikanya sebagai media para peserta untuk menggali pengetahuan, contohnya pengetahuan pola penggarapan lahan yang digunakan oleh SHK Lestari yang telah ia terapkan. Di lahan seluas 4 hektar yang beliau miliki, ia menerapkan pola tanaman campuran. Sehingga Bpk Sowondo dapat mengoptimalkan lahan yang ia punya dengan menanam jenis tanaman lain nya. Tidak hanya menggabungkan pada tanaman utama nya yaitu kopi dan coklat saja.³⁵

b. Pemetaan partisipatif

Pemetaan adalah suatu cara untuk menggambarkan suatu daerah atau tempat agar dapat mengetahui letak, lokasi maupun potensi yang terdapat di daerah tersebut. Biasanya pemetaan dilakukan dalam program perencanaan pembangunan suatu daerah, sebelum membangun daerah tersebut maka dilakukan pemetaan terhadap daerah tersebut, dengan tujuan dapat mengetahui apakah daerah tersebut strategis dalam program pembangunan yang akan dilakukan, dan potensi-potensi apa saja yang terdapat di daerah tersebut baik itu potensi alam ataupun yang lainnya yang bisa dapat menunjang program pembangunan tersebut.

Merujuk penjelasan diatas maka begitupula dengan yang dilakukan oleh SHK Lestari yang di dampingi oleh Walhi (Wahana

³⁵ Sowondo (Anggota SHK Lestari Talang Tersenyum), Wawancara 26 Agustus 2018

Lingkungan Hidup) Prov.Lampung, berdasarkan penjelasan bpk Agus guntoro yaitu untuk menukung program Perencanaan tata guna lahan maka perlu adanya pemetaan pada daerah tersebut. dengan ada nya peta wilayah maka masyarakat dapat menetapkan wilayah-wilayah lindung, menetapkan batas wilayah kampung dan antar pedukuhan, menetapkan wilayah budidaya lahan, menetapkan jenis tanaman, menetapkan wilayah cadangan dan menetapkan pola budidaya.³⁶

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bpk Mudrika, beliau juga menjelaskan bagaimana awal kegiatan pemetaan partisipatif, yaitu berawal dari kegiatan pelatihan pemetaan partisipatif, kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi dan sekaligus langkah penyadaran kepada masyarkat terhadap banyak nya manfaat yang mereka peroleh dari kegiatan pemetaan partisipatif tersebut. Materi yang di sampaikan dalam pelatihan ini yaitu menjelaskan manfaat dan kegunaan peta, menjelaskan skala peta, menjelaskan peralatan dan kegunaannya, teknik membaca kontur , teknik penggunaan alat dan teknis pembuatan peta.³⁷

Setelah masyarkat menyadari dan memahami tentang manfaat dari pemetaan tersebut, maka dengan di dorongnya oleh inisiatif masyarakat untuk di adakanya kegiatan pemetaan di kawasan Hutan Wan Abdurahman tersebut, yaitu SHK Lestari mengadakan kegiatan Pemetaan

³⁶ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

³⁷ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 26 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari

Partisipatif yang di dampingi oleh Walhi sebagai Fasilitator. Menurut bpk Mukri dipilihnya pemetaan partisipatif di sini ialah di karenakan masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemetaan tersebut.³⁸

Proses Pemetaan yang dilaksanakan oleh SHK Lestari pertama ialah dibentuk nya dua kelompok dari masyarakat yang ikut berpartisipasi yaitu tim potensi dan tim wilayah, yang dua-dua nya memiliki fungsi kerja masing masing. Jika tim potensi berkerja mengambil titik koordinat potensi kampung, sedangkan tim wilyah memiliki tugas mengambil titik batas wilayah kampung. Masyarakat menggunaka peralatan yang sederhana, dimana alat-alat tersebut mudah di dapatkan oleh mereka salah satunya GPS (*Global Posisi Sistem*), supaya mengetahui letak posisi tempat yang diambil. Sehingga nantinya bisa dipindahkan di peta.³⁹

Setelah data sudah terkumpul lalu data tersebut di kelola menjadi data sementara. Tahap berikutnya di dalam forum diskusi masyarakat dan Walhi mengelola dan membuat peta sementara, selanjutnya di diskusikan kembali untuk merevisikan peta tersebut dan diperbaiki. Tahap terakhir yaitu setelah peta di setuju maka peta tersebut di sosialisasikan kepada masyarakat di sekitaran Wilayah Hutan Wan Abdurahman.⁴⁰

³⁸ Mukri (Perwakilan Pengurus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2018

³⁹ Dokumentasi Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan Kawasan Hutan Wan Abdurahman, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, 2005

⁴⁰ Ibid.,

Dari setiap proses pemetaan partisipatif tersebut menurut bapak Suratman selaku peserta dan anggota SHK Lestari menyatakan masyarakat mendapatkan proses pembelajaran di setiap tahap nya seperti bagaimana masyarakat dapat membaca skala peta, bagaimana masyarakat mengetahui pembuatan peta secara sederhana. Selain itu masyarakat juga dapat memahami akan potensi alam baik flora, fauna, sungai, gua dan lain-lain yang ada di wilayah hutan Wan Abdurahman.⁴¹

c. Training Resolusi Konflik

Menurut pengamatan peneliti di kawasan hutan Wan Abdurahman termasuk kawasan yang cenderung mempunyai potensi konflik, baik konflik dari sesama masyarakat atau pun dengan lembaga. Biasanya konflik yang terjadi perihal perizinan lahan, hak keelola hutan, atau akuisasi lahan garapan.⁴² Selanjutnya melihat kondisi tersebut maka perlu adanya masyarakat dibekali pengetahuan tentang penyelesaian masalah.

Di latar belakang oleh masa lalu yang kelam yaitu konflik antara masyarakat dan dinas kehutanan perihal perizinan lahan berujung pengusiran masyarakat, meskipun untuk saat ini permasalahan tersebut sudah diredakan dengan adanya kerja sama anatar masyarakat dan Dinas Kehutanan, tetapi SHK Lestari tetap memberikan pengetahuan kepada

⁴¹ Suratman (Anggota SHK Lestari Talang Sri Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

⁴² Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 10 Agustus 2018

anggota nya tentang penyelesaian konflik sebagai bahan pembelajaran masyarakat, dengan mengadakan kegiatan Training resolusi konflik.⁴³

Tujuan dari training resolusi konflik ini yaitu selain sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam hal mamenyelesaikan permasalahan yang nanti apabila mereka hadapi kedepannya, dan masyarakat mampu melakukan langkah-langkah pencegahan dini konflik tersebut sebelum terjadi permasalahan yang menjadi besar.⁴⁴

Proses traning resolusi konflik yaitu berbentuk forum yang dimana dipimpin oleh seorang moderator perwakilan dari pengurus SHK Lestari dan di damping oleh perwakilan Walhi dan Dinas Kehutan sebagai narasumber yang memaparkan berbagai materi seperti pemetaan konflik, langkah-langkah penyelesaian sengketa, dan pilihan model penyelesaian (perundingan, pengadilan). Setelah masyarakat diberi materi, mereka lalu di bagi dalam berbagai kelompok dan di setiap kelompok itu masyarakat di berikan suatu contoh permasalahan yang harus mereka selesaikan sesuai dengan materi yang telah mereka dapatakan.⁴⁵

Di mulai dengan peserta memastikan bentuk persoalan yang sedang berkembang, mengetahui tempat terjadinya perkara, memastikan

⁴³ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

⁴⁴ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 26 Agustus 2018 di Sekretariat SHK Lestari

⁴⁵ Ibid, ..

waktu kejadian dan durasinya, memastikan korban, dan mengetahui bentuk yang diderita/kerugian. Setelah peserta mediskusikan di setiap kelompoknya lalu data temuan tersebut di tuangkan dalam bentuk pemetaan konflik. Dari pemetaan konflik tersebut peserta dapat mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa dan dapat menentukan model penyelesaian apa dengan perundingan atau pengadilan. Lalu kegiatan terakhir dari training resolusi konflik ini yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan di depan forum tersebut.⁴⁶

Respon masyarakat khususnya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut ialah sangat antusias. Keantusiasan ini tercerminkan berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota SHK Lestari yang menjadi peserta yaitu bpk Isra mengatakan *“Pada saat itu suasana kegiatan training resolusi konflik sangat lah seru mas, soalnya kan biasanya nih kita masyarakat kalua datang ke suatu forum hanya sebagai pendengar dan lalu kita bertanya kalua ada yang tidak kita mengerti. Tetapi di kegiatan ini kita peserta di ikut sertakan, sehingga kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang di beri oleh panitia. Itu jadi tantangan sendiri untuk kami mas”* tuturnya.⁴⁷

Selain respon dari masyarakat, kegiatan training ini juga mendapatkan apresiasi dari dinas kehutan prov lampung menurut mereka

⁴⁶Ibid,...

⁴⁷ Isra (Anggota SHK Lestari Talang Karya Mukti), Wawancara 26 Agustus 2018

kegiatan-kegiatan yang telah di selenggarakan oleh SHK Letsari sangatlah bagus dan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakatnya. Pihak dinas kehutanan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh SHK Letari selagi itu memberikan dampak yang baik. Baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kebaikan untuk kelestarian hutan.⁴⁸

d. Pembentukan Radio Komunitas

Pembentukan Radio Komunitas Radio Gema Lestari (RGL) FM pada tahun 2014 merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh SHK Lestari untuk menyebarkan gerakan kelestarian hutan yang mereka galangkan. Tujuan dari pembentukan radio komunitas selain sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal Pengenalan manfaat dan fungsi radio, Pengenalan prekwensi radio, Pengenalan peralatan , Teknik mengoperasikan radio, Teknik mengemas berita, dan Teknik menyusun program acara/rubric.

Tetapi juga sebagai media promosi atau media untuk menyebar luaskan gerakan kelestarian hutan yang SHK Lestari galangkan kepada masyarakat yang terjangkau dengan prekwensi radio komunitas tersebut. dan tentunya masyarakat di sekitar kawasan hutan Wan Abdurahman. Radio komunitas yang dibentuk oleh SHK Lestari selalu memberikan

⁴⁸ Sumardi (Perwakilan Dinas Kehutanan Prov, Lampung, Wawancara Pada Tanggal 22 Agustus 2018 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Lampung

program acara yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, baik itu sebuah informasi, solusi ataupun inovasi dalam pengelolaan hutan.⁴⁹

Harapan dari dibentuk nya Radio ini yaitu semakin banyak nya masyarakat di sekitar hutan Wan Absurahman sadar dan peduli akan kelestarian hutan yang mereka miliki, dan juga dapat memotivasi masyarakat di sekitar hutan Wan Absurahman ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan. Karena tidak bisa dipungkiri kelestarian hutan dapat mempengaruhi kesetabilan di dalam aspek kehidupan manusia.⁵⁰

5. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan yaitu tahap dimana anggota SHK Lestari diberikan daya, kekuasaan dan peluang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Karena pada hakikatnya program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang baik.

Tahap pendayaan adalah tahap dimana anggota SHK Lestari akan di berikan kebebasan dalam melaksanakan penggarapan lahan, maksudnya masyarakat dapat bebas mengerjakan aktifitas yang lain selain melaksanakan penggarapan lahan guna mengisi waktu yang kosong.

Langkah yang sangat tepat yang telah dilakukan oleh SHK Lestari untuk menguatkan para anggotanya dengan cara membuat terminal atau

⁴⁹ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 26 Agustus 2018

⁵⁰ Ibid,...

tempat pengumpulan untuk menampung hasil perkebunan para anggotanya. Menurut Bpk Susmiadi selaku pengurus SHK Lestari menjelaskan terminal penampungan ini bertujuan untuk membantu para anggota dalam hal distribusi, selain itu sekaligus bertujuan sebagai wadah untuk mengelola hasil perkebunan menjadi sesuatu bentuk produksi kemasan.⁵¹

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut menurut Bpk asep ialah beliau merasa terbantu dalam hal pendistribusian. Karena jika masyarakat yang menjual sendiri mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang memuaskan cenderung murah disebabkan keterbatasan mereka dalam hal penyaluran distribusi hasil panen. Tetapi apabila mereka bekerja sama dengan SHK Lestari maka permasalahan keterbatasan distribusi itu bisa di atasi di karenakan SHK Lestari mempunyai link relasi dalam hal penyaluran tersebut, sehingga harga jual dapat lebih sedikit naik dari harga yang dijual mereka sendiri.⁵²

Selain itu persentasi hasil yang di terima oleh SHK Lestari juga tidak terlau mebebankan bahkan tidak merugikan masyarakat. Karena hasil yang di terima SHK tersebut akan di kembalikan kembali ke mereka dalam bentuk fasiitas-fasilitas yang dapat menunjang para masyarakat hal penggarapan

⁵¹ Susmiadi (Pengurus SHK Lestari, Seksi Ekonomi) Wawancara tanggal 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari

⁵² Asep (Anggota SHK Lestari Talang Karya Mukti), Wawancara 02 September 2018

seperti pembuatan/perbaikan jalan hutan, pembuatan gubuk, atau untuk modal usaha bersama yang digerakan oleh SHK lestari.⁵³

Upaya lainnya dalam penguatan anggotanya yaitu SHK Lestari mengenalkan kepada anggota SHK Lestari tentang ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang peran utama nya di pegang oleh pelaku ekonomi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, menurut Bpk Agus Guntoro Ekonomi kerakyatan di jadikan basis utama dalam penggerakan ekonomi di kawasan Hutan Wan Abdurahman.⁵⁴

Untuk menumbuhkan pelaku ekonomi di kalangan masyarakat, usaha yang di berikan oleh SHK Lestari yaitu mengadakan beberapa training atau pelatihan-pelatihan yang dapat dijadikan motivasi masyarakat untuk menjalankan usahanya sendiri, beberapa pelatihan tersebut ialah penyuluhan usaha homestay, training pembuatan kripik emping, pelatihan Pembuatan Makanan/minuman kesehatan instan (Sirup, Manisan dll), dan lain-lainnya.⁵⁵

Usaha lainnya yang SHK Lestari lakukan demi terlaksana nya kegiatan ekonomi kerakyatan di kawasan tersebut ialah mendirikan suatu wadah yang bergerak dalam membantu anggota dalam pengadaan modal usaha yaitu Kelompok Simpan Pinjam Usaha (KSPU). Terbentuk nya KSPU ini yaitu bertujuan dapat membantu para anggota dalam mengatasi

⁵³ Susmiadi (Pengurus SHK Lestari, Seksi Ekonomi) Wawancara tanggal 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari

⁵⁴ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 02 September 2018

⁵⁵ Mudrika (Pengurus SHK Lestari, Seksi Kelembagaan) Wawancara tanggal 02 September di Sekretariat SHK Lestari

permasalahan keuangan dalam menjalankan usahanya termasuk permasalahan modal.

Menurut pengamatan penulis usaha yang dilakukan oleh SHK Lestari dalam menciptakan suasana ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat kawasan hutan Wan Abdurahman sudahlah cukup baik. Meskipun pelaku ekonomi di sana menurut Bpk Agus sangatlah sedikit, ada tetapi hanya beberapa saja. Di katakan cukup baik karena meskipun masyarakat yang menjadi pelaku usaha masih minim tetapi kegiatan Usaha bersama yang di gerakan oleh SHK Lestari sangatlah berkembang pesat dengan usaha produksi kemasannya.⁵⁶

6. Hasil dan Pendapatan Petani

Musim panen yang menggunakan metode kebun campuran memiliki perbedaan musim panen di setiap tanamannya. Contohnya Coklat, Kopi, Durian, dan tangkil yang menjadi komoditas utama para petani SHK Lestari, memiliki perbedaan-perbedaan waktu pada saat musim panen. Musim panen coklat jatuh pada bulan Februari sampai bulan Agustus, musim panen kopi pada bulan Maret sampai bulan Agustus, musim panen tangkil bertempo setahun dua kali yaitu pada bulan Desember sampai bulan Februari dan bulan Juni sampai bulan Agustus, sedangkan musim panen durian yaitu pada awal tahun di bulan Januari sampai bulan Februari.⁵⁷

⁵⁶ Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 02 September 2018

⁵⁷ Dokumentasi Kalender Musim Panen SHK Lestari

Dan berikut rencian daftar hasil panen, daftar harga satuan, serta pendapatan kotor pertahun dari setiap komoditas utama petani SHK Lestari:

Tabel 7. Rincian Komoditas Produksi Pertahun SHK Lestari (Harga Pasaran Tahun 2018)

No	Komoditas	Hasil Panen/ Pertahun	Harga Satuan	Pendapatan Kotor
1	Coklat/Kakao	133 ton	Rp 20.000 /Kg	Rp. 2.660.000.000
2	Kopi	30 ton	Rp 20.000/Kg	Rp. 600.000.000
3	Melinjo	20 ton	Rp 10.000/Kg	Rp. 200.000.000
4	Durian	10.000 Buah	Rp 50.000/buah	Rp. 500.000.000

Sumber: *Ketua SHK Lestari Dalam, wawancara 18 September 2018*

Tabel di atas merupakan Rincian hasil produksi dari seluruh petani SHK Lestari, jika di kerucutkan menjadi pendapatan kotor perindividu maka rincian nya ialah dalam satu hektar lahan yang di garap oleh seorang petani dapat memproduksi coklat/kakao sebanyak 3.570 kg dalam setahun dengan harga jual Rp 20.000/Kg maka pendapatan kotornya sebesar Rp. 71.400.000. Memproduksi Kopi sebanyak 1.000 kg dalam setahun dengan harga jual Rp 20.000/Kg maka pendapatan kotornya sebesar Rp.20.000.000. Memproduksi melinjo sebanyak 1500 kg dalam setahun dengan harga jual Rp 10.000/Kg maka pendapatan kotornya sebesar Rp. 15.000.000. Sedangkan untuk untuk Durian memproduksi sebanyak 300 buah dalam setahun dengan harga jual Rp 50.000/buah maka pendapatan kotornya sebesar Rp. 15.000.000. Pendapatan

yang telah di jelaskan di atas merupakan pendapatan kotor belum di kurangi dengan biaya modal produksi.⁵⁸

C. Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Dalam Mengolah Hasil Hutan Menjadi Produk Usaha

Tidak hanya menjual hasil hutan yang berbahan mentah atau yang belum di olah. SHK Lestari juga mencoba melakukan kegiatan mengolah Hasil Hutan menjadi suatu produk usaha yang dapat menghasilkan pemasukan atau pendapatan. Adapun dalam mengolah Hasil Hutan menjadi produk usaha, SHK Lestari mengerakan partisipasi dari anggota SHK Lestari yaitu dengan dibentuk nya wadah untuk mengelolah hasil panen.

Telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa dalam usaha mendayakan Anggota nya, SHK Lestari telah melakukan beberapa cara yaitu *pertama*, membuat terminal pengumpul hasil panen, dan *kedua*, membuat suatu wadah untuk mengelola hasil panen untuk dijadikan suatu produksi kemasan yang bernilai jual.

Dibuatnya wadah untuk mengelola hasil panen menurut Bpk Susmiadi ialah bertujuan agar anggota atau masyarakat selain berkerja menggarap lahan, mereka juga bisa mengisi waktu luang mereka dengan bekerja mengelola hasil panen untuk di jadikan suatu produk kemasan. Yang mana nanti nya pendapatan

⁵⁸ Susmiadi (Pengurus SHK Lestari, Seksi Ekonomi) Wawancara tanggal 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari

dari hasil penjualan produksi tersebut dapat di bagi kepada mereka sesuai jasa yang telah mereka lakukan.⁵⁹

Sebelum menjalankan kegiatan pengelolaan hasil panen. SHK Lestari dengan di dampingi oleh Walhi melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau anggota SHK Lestari tentang kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan. yaitu kegiatan usaha ekonomi mikro yang dijalankan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan di adakanya kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk memberi pemahaman dan daya dorong atau motivasi kepada masyarakat agar masyarakat melakukan kegiatan berwirausaha dengan menggunakan bahan dasar produksi yang ada di sekitar mereka.

Setelah melakukan sosialisasi, Walhi memanggil beberapa narasumber untuk memberikan beberapa training pembuatan makanan yang dapat dikemas kepada anggota SHK Lestari yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pegelolaan tersebut. Dimana tujuan nya ialah sebagai bahan pembelajaran para anggota dalam membuat makanan-makanan tersebut, sehingga nantinya apabila makanan tersebut di pasarkan rasa dan kualitas nya sesuai degan Standar Oprasionalnya (SOP).

Setelah melalui training atau pelatihan tersebut pengurus SHK Lestari bersama anggota menetapkan produk-produk makanan kemasan apa saja yang ingin mereka produksi dan pasarkan, dalam mentapkan produk mereka selalu

⁵⁹ Susmiadi (Pengurus SHK Lestari, Seksi Ekonomi) Wawancara tanggal 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari

memperhatikan hal-hal yang penting seperti pangsa pasar, ketersediaan dan keterbatasan bahan pokok nya. Dibawah ini adalah produk kemasan makanan yang SHK Lestari produksi yaitu;

Tabel 8. Daftar Produk Usaha Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari

No	Nama Produk Usaha
1	Bubuk Coklat
2	Bubuk Cabai
3	Emping Melinjo
4	Bubuk Kopi
5	Kelanting

Sumber: Hasil Wawancara yang di olah peneliti pada tanggal 10 Agustus 2018

Berdasarkan wawancara dengan Pak Agus Guntoro Produk-produk yang di pasarkan oleh SHK Lestari kalau di perhatikan merupakan produk yang ketersediaan bahan nya sangat mudah di cari, karena sebagian besar bahan yang di perlukan merupakan tanaman utama para anggota SHK Lestari seperti Coklat, Melinjo dan Kopi. Sehingga ada interaksi saling tolong menolong antara SHK Lestari dengan anggotanya dalam membeli bahan pokok produksinya.⁶⁰

Selanjutnya Bpk Susmiadi juga menjelaskan modal usaha SHK Lestari dalam menjalankan pengelolaan hasil panen bersama ini yaitu berasal dari pendapatan bagi hasil pendistribusian hasil panen yang di serahkan anggota ke

⁶⁰ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 02 September 2018

SHK Lestari di terminal penampungan. Modal tersebut untuk memenuhi kegiatan produksi makanan yang diolah oleh SHK Lestari.⁶¹

Proses kegiatan produksi olahan hasil hutan dimulai dari pembelian bahan-bahan pokok produksi, bahan-bahan seperti kopi, coklat, melinjo, cabai, dan singkong dibeli di anggota SHK Lestari yang memiliki hasil panen yang dibutuhkan untuk menjadi bahan pokok produksi. Biasanya SHK Lestari membeli bahan pokok sebanyak-banyaknya pada musim panen, karena sebagai antisipasi kekurangan bahan apabila kedepannya bahan mengalami keterbatasan karena belum panen atau anggota SHK Lestari mengalami gagal panen.⁶²

Proses selanjutnya yaitu bahan-bahan tersebut di olah bersama anggota SHK Lestari di salah satu rumah warga atau di sekretariat SHK Lestari. Anggota SHK Lestari mengolah bahan-bahan tersebut sesuai dengan Standar Oprasional yang telah mereka sepakati di saat pelaksanaan traning. Standar Oprasional tersebut mencakupi proses memasak/mengelolah, rasa, bentuk, isi (gram) setiap bungkusnya, dan cara pengemasan nya.⁶³

Dikarenakan keterbatasan tempat proses pengolahan produksi, maka untuk memproduksi suatu produk di lakukan berbeda-beda hari, apabila minggu pertama memproduksi bubuk coklat maka untuk minggu kedua nya mereka

⁶¹ Susmiadi (Pengurus SHK Lestari, Seksi Ekonomi) Wawancara tanggal 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari

⁶² Ibu Juli (Anggota SHK Lestari Talang Karya Makmur) Wawancara 02 September 2018

⁶³ Ibid.,

memproduksi bubuk kopi dan seterusnya, biasanya mereka akan mendahulukan untuk memproduksi produk yang permintaan pasarnya banyak ⁶⁴

Untuk pemasaran nya, SHK Lestari menyalurkan produk makanan kemasan tersebut di pasar-pasar atau market-market sekitaran Desa Hanura seperti Pasar Hanura, Warung-warung kecil, dan Market modern. Tak hanya di jual di sekitaran desa. Produk-produk tersebut terkadang mendapat permintaan dari luar daerah. ⁶⁵

Menurut pengamatan peneliti kegiatan ini sudah sangat baik di lihat dari Produk-produk usaha yang di produksi SHK Lestari sudah menjadi produk unggulan desa yang dapat di branding menjadi produk oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata Taman Hutan Raya Wan Abdurahman dan wisata lainnya yang disekitaran Desa Hanura. ⁶⁶

Dari kegiatan produksi tersebut juga telah memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya yang ikut berpartisipasi. Mereka dapat menambah penghasilan keluarga mereka dari pekerjaan memproduksi produk makanan ringan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa sampel yang penulis ambil dalam kegiatan ini, rata-rata mereka menyatakan mengalami perubahan dari segi kesejahteraan. Terlihat dari kemampuan anggota SHK Lestari dalam memenuhi kebutuhannya. Anggota SHK Lestari mampu menyediakan makanan

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Ibu Suci (Anggota SHK Lestari Talang Puja Kusuma) Wawancara 09 September 2018

⁶⁶ Observasi Langsung pada tempat SHK Lestari Pesawaran pada tanggal 02 September

berupa daging/telur/ayam setiap minggunya. Dan fasilitas rumahnya rata-rata sudah permanen dan berlantaikan semen atau kramik. Anak-anak dari anggota SHK Lestari dapat mengenyam pendidikan yang baik dan mereka dapat menisihkan dari pendapatannya untuk ditabungkan.⁶⁷

Salah satu contohnya yaitu seperti bapak Syahroni beliau merupakan salah satu anggota SHK Lestari yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, ia menggarap lahan miliknya seluas 3,5 Hektar. Di lahan tersebut dia menanam tanaman utama nya ialah coklat dan kopi, sedangkan tanaman penunjang nya ialah petai, durian, dan lain-lainnya. Beliau tidak mempunyai pekerjaan yang menetap seperti pegawai/karyawan atau PNS. Penghasilan keluarga Bapak Syahroni bergantung kepada musim panen dan banyaknya hasil panen. Jika ia beruntung maka penghasilan yang diterima dapat terpenuhi kebutuhan keluarga, jika terjadi kegagalan panen maka kebutuhan keluarga pun berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut bapak Syarohni mengikuti kegiatan Kelompok usaha bersama yang digalangkan oleh SHK Lestari sebagai pekerjaan sambilaan.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syarohni, beliau berkata “ *Setelah saya dan istri saya ikut bergabung dalam kegiatan usaha bersama itu, kami*

⁶⁷ Ibu Suci, Ibu Juli, Bapak Badri, Bapak Syarohni, Bapak Iswadi, Bapak Juniar, Bapak Jahari dan lain-lainnya, Wawancara 09 September 2018 di kantor sekretariat SHK Lestari

⁶⁸ Pekerjaan Sambilaan ialah suatu pekerjaan sampingan dari suatu pekerjaan pokok yang dikerjakan oleh seseorang. Biasanya seseorang mencari pekerjaan sambilaan, dikarenakan ada beberapa sebab seperti kurangnya pendapatan yang diterima dari pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau hanya untuk meluangkan waktu kosong dari pekerjaan pokok tersebut

dapat menambah penghasilan keluarga kami, kebutuhan hidup sehari-hari kami dapat terpenuhi dari pembagian hasil bekerja di Kelompok usaha bersama tersebut, dan kami bisa menabung untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari penghasilan penjualan hasil panen”, tuturnya.⁶⁹

Sedangkan menurut Bapak Badri selain ia mendapatkan penghasilan dari mengikuti kegiatan produksi tersebut, ia juga mendapatkan pengalaman dan pembelajaran bagaimana cara memproduksi produk makanan kemasan dan bagaimana cara pemasaran nya. Penalaman ini sangat di butuh kan kedepannya apabila dia ingin membuka sesuatu usaha sendiri. Dan menurut ia juga manfaat dari mengikuti kegiatan ini ialah beliau dapat memanfaatkan waktu kosongnya saat tidak menggarap lahan dan sambil menunggu musim panen tiba.⁷⁰

⁶⁹Syahroni (Anggota SHK Lestari Talang Karya Makmur), Wawancara 09 September 2018

⁷⁰Badri (Talang Puja Kusuma) Wawancara 09 September 2018

BAB IV

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN DI HUTAN RAYA WAN ABDURAHMAN DESA HANURA KEC. TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN

A. Upayah Sistem Hutan Kerakyatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Raya Wan Abdurahman Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Dalam memberdayakan masyarakat yang homogen di dalam suatu kawasan, seperti masyarakat petani yang hidup dikawasan Hutan. Maka pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi nya yang mana telah di jelaskan di Bab II dalam Teori Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Aras Mezzo yaitu pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Karena pada umumnya proses pemberdayaan masyarakat dilakukan secara kolektif. Tujuannya yaitu membuat kelompok masyarakat tersebut memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, mereka dibentuk agar mereka memiliki kemampuan untuk di implimentasikan dengan kemampuan lokal yang mereka miliki.¹

Dengan penjelasan diatas maka sudah tepat sekali masyarakat Kawasan Hutan Wan Abdurahman khusus nya Desa Hanura untuk membentuk Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari, yaitu kelompok Swadaya Masyarakat yang kelompoknya tersebut memiliki kesadaran sebagai masyarakat dan bertekad untuk

¹Bab II Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan hal 34

mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui pemberdayaan dan mengembalikan fungsi konservasi dan melestarikan alam dengan ke arifan local setempat. Kalimat tersebut sependapat dengan arti pemberdayaan menurut Slamet (dalam buku Oos M. Anwas), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri dengan kesadaran sendiri dan kemampuan yang mereka miliki. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, mengambil resiko. Menangkap informasi, dan bertindak inisiatif.²

Di dalam prinsip prinsip SHK lestari juga tercermin prinsip-prinsip yang di terapkan di dalam pemberdayaan yang mana telah di jelaskan di Bab II³ yaitu *Pertama Partisipatif*, pengelolaan hutan yang menggunakan Sistem Hutan Kerakyatan dalam pelaksanaan nya berpusat pada masyarakat (*People of Centered*) yaitu Pelaku utama pengelola adalah rakyat (Anggota SHK Lestari) secara bersama. Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh Anggota SHK Lestari dalam hal ini masyarakat Desa Hanura. *Kedua Kestaraan*, Mengedepankan kesetaraan social (gender) dalam melakukan

²Oos M. Anwas, *Op.Cit.* hal 49

³ Bab II Prinsip-prinsip pemberdayaan hal 36

pengelolaan hutan. Peran wanita dan laki-laki memiliki peran yang sama dan hak yang sama dalam pengelolaan hutan.

Ketiga Keswadayaan, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari merupakan sebuah kelompok Swadaya Masyarakat yang mana kelompok tersebut anggota nya memiliki kesadaran dan kesukarelaan sebagai masyarakat untuk saling bekerjasama satu sama lain untuk merubah keadaan mereka dan bertekad untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui pemberdayaan dan pelestarian alam yang sampai saat ini masih terjaga kelestariannya serta mengeolah hasil hutan menjadi suatu produk usaha yang bernilai jual.⁴

Karena pengelolaan SHK Lestari dalam pelaksanaan nya berpusat pada masyarakat (*People of Centered*) maka di setiap tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan Hutan yang di galangkan oleh SHK Lestari selalu melibatkan partisipasi atau campur tangan dari masyarakat di kawasan Hutan Wan Abudrahman. Berikut analisa peneliti tentang pemberdayan masyarakat di dalam pelaksanaan SHK Lestari dan keikut sertaan masyarakat khususnya anggota SHK Lestari di setiap tahap-tahap pelaksanaan SHK Lestari;

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran adalah tahap awal dalam pemberdayaan masyarakat. Di tahap ini masyarakat di berikan suatu pemahaman agar terjadiya proses penyadaran di kalangan masyarakat. Telah di jelaskan di Bab II menurut Nanik Machendarawaty pada zaman Rasulullah langkah pertama

⁴Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 10 Agustus 2018

yang ia lakukan dalam memberdayakan masyarakat pada zaman itu ialah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat (*Takwin*). Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini fasilitator atau pemberdaya masyarakat mampu menciptakan kondisi yang baik dan memotivasi mereka untuk melakukan penyadaran dari kondisinya pada saat itu.⁵

Melihat dari penjelasan di atas dalam proses penyadaran masyarakat di Kawasan Hutan Wan Abdurahman dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung. Walhi berperan sebagai Fasilitator persiapan pembentukan SHK Lestari. Walhi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Sistem Hutan Kerakyatan yang bisa dijadikan alternative dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada masa itu di Kawasan Hutan Wan Abdurahman, yaitu persoalan hak lahan masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Kalimat tersebut sangat relevan dengan teori pendekatan menurut Suharto yang telah di paparkan di Bab II, dalam pelaksanaa pemberdayaan yang melalui pendekatan penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu

⁵ Bab II Proses Pemberdayaan hal 41

menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.⁶

Dalam melakukan proses penyadaran yang dilaksanakan oleh Walhi dilakukan secara perlahan yaitu diawali dengan cara Interaksi Sosial dengan masyarakat bertujuan agar timbulnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Walhi. Setelah masyarakat merasakan kedekatan dan rasa kepercayaan maka langkah selanjutnya Walhi melakukan sosialisasi di dalam suatu forum diskusi bersama masyarakat, di dalam Forum tersebut Walhi memberikan pemahaman tentang pengelolaan hutan yang menggunakan Sistem Hutan Kerakyatan.

Keikutsertaan masyarakat di setiap forum diskusi yang dilakukan oleh Walhi menimbulkan rasa kepercayaan mereka terhadap konsep pengelolaan hutan tersebut, masyarakat dapat menyadari dan mempercayai dengan konsep pengelolaan hutan Sistem Hutan Kerakyatan dapat memberikan suatu perubahan yang baik di masyarakat kawasan Hutan Wan Abdurahman.

Tingkat kesadaran tersebut dilihat dari banyak nya masyarakat yang percaya dan ikut bergabung di dalam kegiatan SHK Lestari yaitu berjumlah 724 orang. Melihat besarnya jumlah anggota SHK Lestari menurut peneliti proses penyadaran yang dilakukan oleh Walhi sudah bisa dikatakan berhasil. Keikutsertaan masyarakat tersebut disebabkan Sistem Hutan Kerakyatan

⁶ Bab II Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan hal 36

merupakan pengelolaan hutan yang tidak mengenal birokrasi karena Sistem Hutan Kerakyatan adalah pola pengelolaan hutan yang sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Ketidakpercayaan dan rumitnya program pengelolaan hutan yang digalangan oleh pemerintah juga termasuk faktor lain mengapa masyarakat lebih memilih Sistem Hutan Kerakyatan.

Selain faktor-faktor di atas, keunikan pengelolaan hutan yang menggunakan konsep sistem hutan kerakyatan ialah dalam pelaksanaannya pengelolaan hutan tetap memperhatikan pengetahuan lokal/teknologi lokal dalam kegiatan pengelolaan hutan, ini merupakan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkonsep berbasis masyarakat yang telah dijelaskan di Bab II.⁷

Budaya dari setiap suku masih digunakan oleh masyarakatnya. Terlihat dari pemilihan tanaman anggota SHK Lestari sangatlah masih kental dengan kebudayaan atau kebiasaan suku masyarakat berasal. Kopi ditanam oleh warga yang bersuku Semendo dan tangkil kebanyakan ditanam oleh warga yang bersuku Banten. Ini menandakan masih sangat kental dengan tanaman nenek moyang masing-masing, sedangkan untuk suku Lampung dan Jawa kebanyakan menanam kopi, tapi ada beberapa juga yang menanam lainnya.

2. Tahap Perencanaan

Suatu program pemberdayaan masyarakat sebelum di aplikasikan ke masyarakat pasti melalui proses perencanaan terlebih dahulu, agar program

⁷ Bab II Prinsip-Prinsip Sistem Hutan Kerakyatan Hal 45

pemberdayaan tersebut berjalan secara semestiyah dan tercapai tujuan yang ingin di dapatkan dari program pemberdayaan tersebut.

Hakikatnya perencanaan program pemberdayaan yang baik ialah perencanaan yang melibatkan masyarakat, di karenakan masyarakat yang lebih tauh kondisi wilayah dan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Selain itu masyarakat juga yang tauh apa yang sangat mereka butuhkan. Maka sudah sewajarnya dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat di dalam nya.

Tahap perencanaan yang dilakukan SHK Lestari dalam merancang program nya pun melibatkan masyarakat, khusus nya masyarakat yang tergabung dengan SHK Lestari. Keikut sertaan mereka terlihat dari aktif nya mereka menyuarakan dalam mengambil keputusan dan menentukan suatu perencanaan atau kebijakan yang akan di terapkan di SHK Lesatri. Dimana telah dijelaskan di Bab III keikut sertaan mereka dapat tersalurkan di dalam forum-forum formal maupun non formal yang ada di SHK Lestari.⁸

Dalam menyusun rencana program kerja, masyarakat selalu memperhatikan aspek kelestarian hutan, dikarenakan hutan merupakan tempat masyarakat bergantung. Maka apabila kelestarian hutan rusak maka suberdaya alam hutan semakin sedikit dan dapat mempengaruhi stabilitas kawasan tersebut.

⁸Bab III Tahap Perencanaan hal 75-76

Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program pemberdayaan ialah sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun dan merancang suatu program pemberdayaan yang baik. Karena pada dasarnya tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani di dalam Bab II adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengandalkan apa yang mereka lakukan.

Menurut Bpk Juniar contoh terbentuknya kemandirian bertindak pada masyarakat di kawasan hutan wan abdurahan yaitu dalam hal memberi pendapat ataupun mengambil keputusan. Masyarakat pada awalnya sangat takut untuk menyuarakan suara karena merasa tidak percaya diri dan takut salah dalam mengambil keputusan sehingga apatis dalam menanggapi suatu program pembangunan, tetapi dengan proses keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program di SHK Lestari perlahan masyarakat dapat percaya diri dalam menyuarakan pendapatannya.⁹

Di ikut sertakan masyarakat juga dapat memberikan dampak yang positif yaitu timbulnya komitmen bersama pada masyarakat kawasan hutan Wan Abdurahman sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab akan keberlangsungan program pengelolaan hutan SHK Lestari. Karena pada akhirnya yang mendapatkan hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan Wan Abdurahman tersebut yaitu masyarakat di sekitaran hutan tersebut.

⁹ Juniar (Anggota SHK Lestari, Talang Cinta Damai) Wawancara tanggal 18 Agustus 2018

3. Tahap Pengembangan Kapasitas

Tahap pengembangan kapasitas adalah proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat sehingga kapasitas pengetahuan masyarakat dapat sangat baik. Tahap pengembangan kapasitas adalah tahap pembinaan atau penataan (*Tandzim*). Telah di jelaskan di Bab II Tandzim yaitu adanya proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik. Dalam hal ini masyarakat akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang baru dimana nanti nya berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.¹⁰

SHK Lestari dalam mengembangkan kapasitas masyarakat nya dengan cara memberikan pendidikan atau pemahaman ke pada anggota, dalam mentransformasikan nya menggunakan beberapa cara baik itu menggunakan pelatihan, ataupun cara lain. Yang mana tujuan nya yaitu pengetahuan anggota SHK Lestari semakin meningkat tidak hanya dalam melestarikan hutan dan budidaya pengelolaan lahan saja tetapi masyarakat dapat memahi pengetahuan selain itu seperti pengetahuan keorganisasian, penyelesaian konflik dll.

Di dalam Bab II telah menjelaskan bahwasanya di dalam pemberdayaan masyarakat porses pendidikan sangat lah penting karena dapat mengubah perilaku masyarakat. Mengubah perilaku ini dimulai dari

¹⁰ Bab II Proses Pemberdayaan hal 41

mengubah cara berpikir (*mind set*) dari pengetahuan dan pemahamannya, selanjutnya diharapkan memiliki sikap yang positif untuk berubah, selanjutnya diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai bentuk usaha untuk mengubah kearah yang lebih nyata.

Pengembangan kapasitas masyarakat yang di lakukan SHK Lestari telah di jelaskan di Bab III yaitu dengan di tandai dibangunnya *Lerning Center* atau perpustakaan SHK Lestari yang mana terdapat buku-buku bacaan tentang pengelolaan, pengarapan hutan maupun perkebunan, pengetahuan umum dan dilengkapi oleh beberapa seperangkat komputer untuk menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat desa hanura khususnya bagi Anggota SHK Lestari.

Menurut Bapak Agus Guntoro selaku Ketua SHK Lestari dengan adanya *Lerning Center* (Pusat Belajar) maka harapannya masyarakat khususnya para petani dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baik itu tentang Pengelolaan Hutan atau tentang Pengetahuan Umum lainnya. Dengan mengetahui dan memahami cara pengelolaan hutan maka petani dapat mengembangkan pengelolaan Hutan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.¹¹

Tidak hanya membangun *lerning Center*, Upaya SHK Lestari dalam mengembangkan kapasitas masyarakatnya ialah sebagai berikut;

¹¹ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 18 Agustus 2018

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Kapasitas SHK Lestari

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Pendidikan Kader Sistem Hutan Kerakyatan dan Pengetahuan Organisasi	Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota terhadap konsep pengelolaan hutan SHK, bagaimana cara menjalankan keorganisasian, bagaimana mengelolah lahan, dan bagaimana menjaga kelestarian hutan.
2	Pemetaan partisipatif	Sebagai media pembelajaran anggota untuk bisa mengenal kawasan hutan wan abdurahman baik itu luas kawasan dan potensi-potensi yang ada di kawasan hutan tersebut, lalu di tuangkan di dalam sebuah peta.
3	Training Resolusi Konflik	Untuk memunculkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang nanti apabila mereka hadapi kedepannya, dan masyarakat mampu mengambil langkah-langkah pencegahan dini terhadap sebuah konflik.
4	Pembentukan Radio Komunitas	Sebagai media anggota untuk menuangkan suara mereka dalam hal mempromosikan gerakan yang sedang mereka jalani yaitu SHK, dengan harap semakin banyak masyarakat yang sadar dan pendula terhadap hutan

Sumber: Hasil Wawancara yang di olah peneliti pada tanggal 10 Agustus 2018

Dari ke empat kegiatan yang di paparkan oleh peneliti, semuanya merupakan bentuk media pembelajaran untuk anggota SHK Lestari, agar mereka tak hanya dapat menguasai menanam tanaman saja tetapi juga dapat mengetahui pengetahuan dan wawasan yang lain nya.

Respon masyarakat khususnya anggota SHK Lestari terhadap kegiatan yang dilakukan SHK Lestari ialah sangat positif, karena kesadaran mereka terhadap pentingnya suatu pengetahuan. Mereka sadar bahwa dengan pengetahuan mereka dapat merubah pola pikir (*Mind Set*) untuk merubah ke hal yang positif.¹²

4. Tahap Pendayaan

Di tahap pendayaan ini ialah tahap dimana masyarakat diberi kebebasan dalam mengambil suatu tindakan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Telah dijelaskan di Bab II bahwa setelah adanya peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan pada masyarakat maka terciptalah masyarakat yang mandiri, kemandirian masyarakat ditandai dengan munculnya inisiatif, inovatif dan kreatifitas pada masyarakat.

Bentuk keinisiatifan anggota SHK Lestari ialah dibentuk nya wadah atau terminal pengumpul hasil hutan yang mana tujuan dari terminal tersebut yaitu untuk membantu para anggota dalam hal distribusi, di karenakan keterbatasan masyarakat dalam hal penyaluran distiribusi hasil hutan yang mereka miliki secara sendiri.

Bentuk inisiatif lainnya yaitu Upaya penguatan anggota SHK Lestari dengan mengenalkan kepada anggota SHK Lestari tentang ekonomi kerakyat yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang peran utama nya di pegang oleh pelaku

¹² Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 18 Agustus 2018

ekonomi masyarakat itu sendiri. Dengan di tandai di bangun nya kelompok usaha bersama yang di komandoi oleh pengurus SHK Lestari

Tujuan dibentuk kelompok usaha bersama ini yaitu agar terciptanya kawasan ekonomi kerakyatan di kawasan hutan Wan Abudurahman. Memotivasi para anggota untuk mempunyai usaha sendiri setelah mengikuti kelompok usaha bersama ini, dan dapat menambah pendapatan masyarakat selain dari penghasilan hasil panen.

Menurut pengamatan penulis Inisiatif yang dilakukan oleh anggota SHK Lestari dalam menciptakan masyarakat yang mandiri sudah cukup baik. Meskipun pelaku ekonomi di sana menurut Bpk Agus sangatlah sedikit, ada tetapi hanya beberapa saja. Di katakan cukup baik karena meskipun masyarakat yang menjadi pelaku usaha masih minim tetapi kegiatan Usaha bersama yang di gerakan oleh SHK Lestari sangat lah berkembang pesat dengan usaha produksi kemasaan nya.¹³

B. Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Dalam Mengolah Hasil Hutan Menjadi Produk Usaha

Sebagaimana telah terurai di Bab III yaitu upaya SHK Lestari dalam mengolah hasil hutan menjadi produk usaha dilakukan secara bersama melalui kelompok usaha bersama. Dengan didirikannya kelompok usaha bersama, SHK Lestari telah melakukan pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi mikro

¹³ Agus Guntoro (Ketua SHK Lestari), Wawancara 02 September 2018 di Sekretariat SHK Lestari Desa Hanura

(Usaha Kecil) kepada anggota nya. Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha.. pemberdayaan dalam aspek ini justru yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat terutama anggota SHK Lestari yaitu berasal dari komoditi atau hasil garapan lahan para anggotanya, komoditas tersebut bisa di jual langsung disebut barang mentah, bisa juga komoditas tersebut diolah menjadi suatu produk usaha disebut barang jadi. Dua-dua nya dapat menghasilkan pendapatan bagi para anggota SHK Lestari.

Dalam memberikan pengarahan tersebut kepada anggota nya, pertama-tama SHK Lestari melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan dunia usaha. Antara lain Pelatihan pembuatan Emping Melinjo, Pelatihan Pembuatan makanan/minuman kesehatan instan (Sirup, Makanan) dan lain-lainnya. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan sebagai bentuk memunculkan kesadaran bagi masyarakat. Bahwasanya potensi yang ada di sekitar kita jika di kembangkan dengan baik, akan menjadi peluang usaha yang menjanjikan di masa yang akan datang. Setelah anggota di berikan pelatihan-pelatihan tersebut maka mereka mengaktualisasikan ke dalam usaha milik bersama yang bernaung di bawah SHK Lestari.

Komoditas tersebut di olah menjadi suatu produk usaha yang telah di inovasi dan di kemas dengan baik, sehingga dapat bernilai jual. Adapun

komoditas yang di olah menjadi suatu produk usaha yaitu komoditas coklat yang di olah menjadi bubuk coklat, komoditas kopi yang di olah dan dikemas menjadi kemasan kopi bubuk, komoditas melinjo di olah menjadi emping, komoditas cabai di olah menjadi bubuk cabai, dan komoditas singkong di olah menjadi makan ringan yaitu kelanting. Produk-produk di atas menjadi usaha pokok yang di produksi oleh SHK Lestari.

Adapun keuntungan SHK Lestari dalam mengolah hasil garapan menjadi sebuah produk usaha yang memiliki nilai jual ialah menjadi branding Desa Hanura sebagai desa yang memiliki makanan khas atau buah tangan para turis yang sedang singgah di desa hanura, karena di sekitaran desa hanura memiliki tempat wisata seperti pantai Sari Ringung, Pantai Mutun, dan Taman Hutan Raya.

Selain keuntungan tersebut SHK Lestari akan mendapatkan keuntungan lain nya, sebagaimana di jelasin di Bab II, menurut Oos M. Anwas (2013), keuntungan yang diperoleh masyarakat mengelola sumberdaya alam menjadi barang jadi ialah;

1. Komoditas barang mentah seperti kopi, coklat, cabai, melinjo, kemiri dan lain nya yang di olah oleh Anggota SHK Lestari menjadi produk usaha maka nilainya menjadi jauh lebih berharga dari pada komoditas yang tidak di olah, sehingga akan meningkatkan pendapatan secara signifikan.

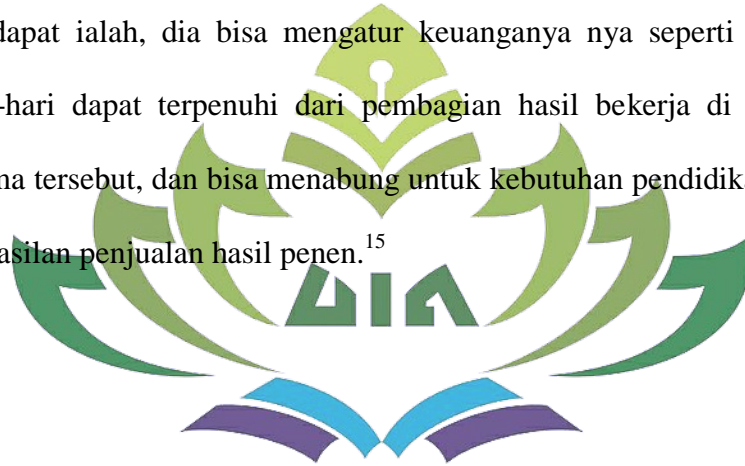
2. Mencegah hasil garapan lahan anggota SHK Lestari tanpa proses produksi akan menciptakan ketergantungan pada pihak lain, karena akan mengakibatkan harga yang tidak menentu, bahkan semakin murah apabila jatuh nya harga komoditas tersebut di harga pasaran.
3. Memunculkan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitaran desa hanura. Dikarenakan untuk memproduksi produk usaha tersebut SHK Lestari memerlukan tenaga kerja.
4. Kemampuan dan keterampilan Anggota SHK Lestari akan meningkat seiring tuntutan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan tersebut. Seperti inovasi rasa, strategi pemasaran, dan pengemasan yang menarik konsumen.¹⁴

Menurut peneliti dampak yang sangat di rasakan oleh masyarakat ialah meningkat nya kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan Wan Abdurahman khusus nya anggota SHK Lestari yang mengikuti kegiatan usaha bersama tersebut. kesejahteraan masyarakat tersebut terlihat dari beberapa indicator yang telah di jelaskan di bab II.

Beberapa indokator tersebut ialah *pertama*, meningkatnya pendapatan masyarakat khusus nya anggota SHK Lestari, yang tadi nya mereka hanya mendapatkan penghasilan dari penjualan hasil panen saja, tetap setelah mereka mengikuti kegiatan usaha bersama tersebut, penghasilan mereka bertambah di karenakan mendapat penghasilan dari kegiatan usaha bersama tersebut.

¹⁴ Oos M. Anwas, *Ibid.*, .hal 132

Kedua, tercukupi nya konsumsi atau pengeluaran keluarga, anggota SHK Lestari sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari khusus nya kebutuhan pokok mereka seperti, sandang pangan dan papan dari pendapatan yang mereka terima baik itu dari hasil panen atau bekerja di kelompok usaha bersama. *Ketiga*, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan penting lainnya contohnya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak anggota SHK Lestari. Berdasarkan wawancara denga bapak Syarohni, beliau berkata keuntungan yang saya dapat ialah, dia bisa mengatur keuanganya nya seperti kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dari pembagian hasil bekerja di Kelompok usaha bersama tersebut, dan bisa menabung untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari penghasilan penjualan hasil panen.¹⁵



¹⁵Syahroni (Anggota SHK Lestari Talang Karya Makmur), Wawancara 09 Agustus 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan dan telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di ambil inti pembahasan atau kesimpulan dari Skripsi yang penulis tulis yaitu sebagai berikut:

Kelompok SHK Lestari melakukan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahap yaitu, *Pertama*, tahap penyadaran dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang Sistem Hutan Kerakyatan. *Kedua*, tahap perencanaan yaitu dengan di ikut sertakan masyarakat dalam menyusun program kegiatan SHK Lestari, keikutsertaan masyarakat tersebut menjadi media pembelajaran masyarakat dalam menyusun suatu program kegiatan. *Ketiga*, Tahap Pengkapasitasan, dalam mentranformasikan kapasitas masyarakat, upaya yang SHK Lestari lakukan yaitu melalui Pendidikan Kederisasi Sistem Hutan Kerakyatan dan Pengetahuan Organisasi, Pemetaan partisipatif, Training Resolusi Konflik dan Pembentukan Radio Komunitas. *Keempat*, Tahap Pendayaan, penguatan yang dilakukan yaitu dengan membentuk wadah atau terminal pengumpul hasil panen dan mendirikan kelompok usaha bersama.

SHK Lestari dalam mengelola hasil hutan/panen dengan dibentuknya kelompok usaha bersama. Kegiatan usahanya yaitu memproduksi hasil panen

anggota SHK Lestari seperti coklat, cabai, melinjo, kemiri, kopi dan lain-lain menjadi suatu produk kemasan yang bertambah nilai jual. Produk kemasan tersebut antara lain ialah bubuk coklat, bubuk cabai, emping melinjo, kopi bubuk, dan kelanting.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu adanya untuk memberikan saran-saran yang mungkin memberikan manfaat, saran-saran itu adalah :

1. Perlu adanya sikap saling bekerja sama dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat di kawasan Hutan tersebut baik dari Pengelola SHK Lestari dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sudah mendukung tetapi terkesan kurang maksimal dalam mendukung upaya program SHK Lestari.
2. Diperlukan adanya suatu pelatihan dalam meningkatkan hasil budi daya tanaman sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas dan dapat berstandar skala ekspor.

Beberapa hal di atas yang penulis rekomendasikan mudah-mudahan hal tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan program pemberdayaan masyarakat khusus nya para anggota SHK Lestari di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dan berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Devwlopment, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Cet. Ke-IX. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta
- Budiwiranto, Bambang. 2014. *Manajemen PMI*. Fakultas Dakwah: UIN Raden Intan Lampung
- Depag RI. 1997. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya : CV. Jaya Sakti
- Fauzi, Hamdani. 2012. *Pemberdayaan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Bandung : Karya Putra Darwati
- H.S, Salim. 2003. *Dasar Dasar Hukum Hutan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Harahap, Syahrin. 1999. *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana
- Kartono, Kartini. 1996. Cet. VII. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Manda Maju
- Koentjaraningrat. 1993. *Metodelogi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- M. Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat si Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Machendarawaty, Nanik dan Ahmad Syafe'I, Agus. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Islam dari Idelogi Strategi sampai Tradis*. Bandung : PT Remaja Rosdikarya
- Mardikanto, Totok & Seobiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Public*. Bandung ; Alfabeta
- Masoed, Muchtar. 1997. *Strategi Pembangunan Berakar Kerakyatan*, Yogyakarta : Jurnal Media Inovasi Universitas Muhammadiyah, Vol 3

- Mudi, Ahsanuddin Mudi. 2004. *Profesional Sosiologi*. Jakarta : Mendiutama
- Octarina, Lathifa. 2014. *Analisis Kesejahteraan Nelayan di Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung : Skripsi Program Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.88/menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Rahmawaty. 2014. *Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat*. Univ. Sumatera Utara: e-USU Repository
- Rahmina. 2012. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Jakarta : Forclime
- Ronny, Kountur. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Buana Printing
- S. Nasion. 2006. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara
- Seotomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Shaleh, Abd. Rasyad. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta : Bulan Bintang
- Soerjani, Ahmad & Munir. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia
- Sri, Agus, & Nyoman. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor : Wetlands Internasional-Indonesia Programe
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suhartono, Irwan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdarya
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tim Media. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Cetak

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologis Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Andi Offset

Yasin, Sulchan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia I*. Surabaya : Amanah

<https://www.wwf.or.id/2018/02/05/Kehutanan> diakses pada tanggal 25 Ferbuari 2018

[http:// donipengalaman9.wordpress.com/2012/03/Landasan Teori – Pengelolaan Hutan](http://donipengalaman9.wordpress.com/2012/03/Landasan%20Teori%20-%20Pengelolaan%20Hutan) diakses pada tanggal 28 Maret 2018

